

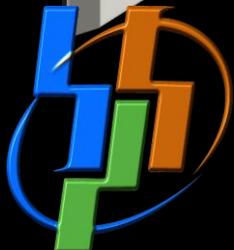


Katalog BPS : 9214.64.05

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL MENURUT LAPANGAN KABUPATEN Berau

*Gross Regional Domestic Product By Industrial  
Origin Of Berau Regency*

**2013**



**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Berau**

---

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
MENURUT LAPANGAN USAHA  
KABUPATEN BERAU**  
*Gros Regional Domestic Product by use of Berau Regency*  
**2013**

---

ISBN	:	979-479-958-0
Katalog BPS <i>BPS Catalogue</i>	:	9205.6405
Nomor Publikasi <i>Pulication Number</i>	:	64.05.5.1001
Naskah <i>Manuscript</i>	:	Seksi nerwilis
Ukuran Buku <i>Book Zise</i>	:	16,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman <i>Number of page</i>	:	Vi +50
Gambar Kulit <i>Cover design</i>	:	BPS Kabupaten Berau
Dicetak oleh <i>Printed by</i>	:	BPS Kabupaten Berau

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**  
***May be cited with reference to the source***

---

## KATA PENGANTAR

Salah satu bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan Ekonomi di daerah selalu membutuhkan informasi yang tepat, akurat dan dapat dipercaya, untuk itu Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau sebagai penyedia data, salah satunya adalah data Publikasi Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) tahun 2013 yang dapat sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. penghitungan dan penerbitannya dilakukan secara berkala setiap tahun. sehingga menjadi manfaat bagi pemerintah daerah dan peneliti sosial ekonomi.

Angka Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) disajikan menurut penghitungan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Sedangkan untuk keperluan analisa sederhana, disusun pula tabel-tabel yang berisikan angka prosentase maupun indeks-indeks tertentu yang lazim digunakan sebagai indikator ekonomi. Demikian juga konsep / definisi yang digunakan dicantumkan agar para pemakai dapat memanfaatkan sebaik mungkin isi publikasi ini dan memahami uraian yang disajikan.

Saran dan kritik untuk perbaikan penghitungan dan penyajian publikasi Peroduk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) pada masa mendatang dari para pengguna data, sangat kami harapkan. Ucapan terima kasih ditujukan pada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Tanjung Redeb, 28 Juli 2014  
Kepala BPS Kabupaten Berau



**Hamdani Hasan, SE**  
NIP. 19581029 197901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR .	i
DAFTAR ISI .....	ii- iv
DAFTAR TABEL . .....	v
DAFTAR GAMBAR .	vi
DAFTAR LAMPIRAN .	vii
BABI    Pendahuluan .	1
1.1 Umum .....	1
1.2 Konsep dan Definisi . .....	13
1.2.1 Out put.....	13
1.2.2 PDRB .....	15
1.2.3 PDRN .....	16
1.2.4 Pendapatan Regional.....	16
1.2.5 PDRB Perkapita.....	17
1.2.6 Perubahan Tahun Dasar .....	17
1.2.7 Klasifikasi Sektor .....	20
1.3 Cara Penyajian .....	21
1.4 Metode Penghitungan.....	22
1.5 Penghitungan PDRB Atas Harga Konstan .....	22
1.5,1 Revaluasi .....	22
1.5.2 Ekstrapolasi.....	23
1.5.3 Devlasi.....	23
1.5.4 Devlasi Berganda.....	24
1.6 Analisis dan kegunaan data PDRB.....	24
1.7 Maksud dan Tujuan .....	27

A. Maksud Penghitungan PDRB.....	27
B. Tujuan Penghitungan.....	27
1.8 Metodolgi, Cakupan dan Ruang Lingkup.....	27
<b>BAB II Uraian Sektoral .( Konsep dan Metodologi) .....</b>	<b>28</b>
2.1 Pengertian PDRB .....	28
2.1.1 Produk Domestik .....	28
2.1.2 Produk Regional .....	28
2.2 Agregat PDRB .....	28
2.2.1..PDRB. ....	29
2.2.2..PDRN.....	29
2.2.3..Pendapatan Netto .....	29
2.2.4..Pendapatan Regional.....	29
2.2.5..Pendapatan Regional.....	29
2.3. PDRB Adhk .....	29
2.4 Pendapatan Regional .....	29
2.5 PDRB LU .....	29
2.6 Metodologi .....	29
2.6.1 Penghitungan PDRB Adhb .....	29
2.6.2 Penghitungan PDRB Adhk .....	30
2.7 Batasan Sektoral.....	30
2.7.1 Sektor Pertanian.....	30
2.7.2 Sector Pertambangan.....	31
2.7.3 Sector Industri .....	32
2.7.4 Sektor Listri, GAS, Air .....	32
2.7.5. Sektor Bangunan/Konstruksi .....	32
2.7.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restorn .....	32

2.7.7. Sektor Pengangkutan.....	33
2.7.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	33
2.7.9. Sektor Jasa- Jasa .....	34
2.8. Pengertian Wilayah .....	34
BAB III Tinjauan Ekonomi Kabupaten Berau .....	46
3.1 Tinjauan Umum .....	46
3.2 Struktur Ekonomi daerah .....	54
3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau .....	57
3.4 PDRB perkapita dan Pendapatan Perkapita .....	63
3.5 PDRB Perkapita Antar DaerH.....	66
LAMPIRAN .....	36

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berakau dan Harga Konstan 2000 tahun 2008 - 2013.....	51
2. Prosentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2008 – 2013( % ) .....	54
3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha tahun 2008 – 2013.....	62
4. PDRB Perkapita Kabupaten Berau Atas Dasar Harga berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001 – 2011.....	63
5. PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur .....	66

## Daftar Grafik

Grafik	Halaman
1. Prosentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2011 .....	44
2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Tahun 2007 – 2011 .....	47
3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita tahun 2011 .....	53
4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Kabupaten /Kota se Proinsi Kalimantan Timur .....	55
5. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2011 .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Umum**

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional. Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah tercapainya masyarakat adil dan sejahterah. Agar tercapainya tujuan ini pemerintah dituntut dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh segenap masyarakat Indonesia. Arah dari pembangunan nasional adalah mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth), pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan, sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju tingkat output produksi dari seluruh sektor pada daerah yang tertuang dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik harga berlaku maupun harga konstan. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah (Value added) yang di hasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tertentu, PDRB harga konstan merupakan tolak ukur yang paling mendekati dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, karena merupakan perkembangan produksi riil suatu daerah, bukan karena kenaikan fluktuasi harga. Total dari PDRB tiap daerah akan menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni hasil produksi seluruh penduduk dalam satu negara.

PDRB hanya menghitung total produksi dari suatu Wilayah tertentu tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. menggambarkan adanya kenaikan dalam PDRB Regional, PDRB yang tinggi menggambarkan kinerja produksi keseluruhan penduduk. Tingginya jumlah penduduk di suatu Wilayah akan berpengaruh terhadap tingginya total PDRB, sedangkan pertumbuhan ekonomi Regional mengalami fluktuasi walaupun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Salah satu masalah paling mendasar dalam peningkatan PDRB dan pembangunan Daerah adalah demografi atau faktor kependudukan. Menurut Wilson Rajaguk-guk (2001) pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari kenaikan produk domestik regional bruto daerah, namun di sisi lain diperlukan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk meningkatkan produksi daerah. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Intinya, dalam menuju sasaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah terdapat unsur ataupun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu pengaruh paling potensial adalah masalah kependudukan ataupun demografi khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia.

Isu kependudukan telah lama menjadi permasalahan global, penambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali merupakan ancaman besar bagi negara. Dalam karyanya "Essay on the principle of population" (esai tentang prinsip-prinsip populasi), Malthus mengatakan bahwa jumlah penduduk meningkat tidak terkendali mengikuti barisan ukur (1, 2, 4, 8, dan seterusnya) sedangkan produksi pangan bertambah menurut barisan hitung (1, 2, 3, 4, dan seterusnya) sehingga diprediksi manusia akan mengalami kekurangan pangan tidak mampu mencukupi ledakan penduduk, namun pada kenyataannya teknologi yang semakin canggih membuat manusia dapat mengatur kelahiran dan membuat lahan buatan untuk melipatgandakan hasil pertanian.

Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Di negara maju tingginya laju pertumbuhan penduduk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDB negara karena didukung oleh investasi yang tinggi, teknologi yang tinggi dan faktor

pendukung produksi lainnya. Akan tetapi tidak begitu terealisasi di negara berkembang, akibatnya adalah pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan tidaklah sejalan, karena kondisi yang berlaku sama sekali berbeda dengan kondisi ekonomi negara maju. Ekonomi negara berkembang memiliki karakteristik seperti modal yang kurang, teknologi masih sederhana, tenaga kerja kurang ahli. Karena itu, pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi, selain itu pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran dan akan mendorong meningkatnya beban ketergantungan penduduk.

Terdapat faktor yang dapat mendorong sekaligus juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang dibagi kedalam faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Salah satu faktor dalam non-ekonomi adalah faktor demografi (kependudukan), yakni pengaruh akibat struktur ataupun komposisi penduduk suatu negara atau daerah. Demografi dikatakan sebagai faktor pendorong berupa penambahan penduduk yang menambah jumlah tenaga kerja atau akan meningkatnya jumlah pasar bagi hasil produksi, namun sebagai faktor penghambat, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan berkembangnya usia ketergantungan penduduk, oleh karena itu faktor-faktor demografi dapat sebagai faktor penghambat ataupun sebagai faktor pendorong yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak terbantahkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi demografi penduduk sangat beragam diantara adalah, masalah laju pertumbuhan ekonomi, angka ketergantungan, permasalahan pendidikan berupa rasio penduduk sekolah di sekolah menengah dan laju migrasi merupakan masalah yang sangat krusial untuk diteliti, dimana ke-empat variabel tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jika permasalahan kependudukan tersebut tidak dapat teratasi dengan baik akan menjadi penghambat dalam produksi bruto daerah yang tertuang dalam PDRB harga konstan yang akan melihat perekonomian baik nasional maupun dalam tingkat daerah.

Hubungan langsung akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) yakni perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun atau dapat diartikan sebagai perbandingan penduduk yang tidak bekerja/tidak produktif (menurut indikator usia kerja nasional) dengan penduduk yang bekerja/produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Dalam mewujudkan pembangunan di daerah kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting. Selain Gross National Product (GNP) dan pendapatan perkapita sebagai indikator utama, pendidikan dan distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang menggambarkan sukses atau tidaknya pembangunan nasional maupun di daerah yang akan mengarah terhadap pertumbuhan ekonomi .

Pembangunan bidang ekonomi dilaksanakan dengan berbagai macam program dan kegiatan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan ini tercermin dari upaya Pemerintah Daerah bersama perangkat daerah lainnya berusaha untuk mengembangkan segala potensi yang ada, guna mendorong gerak pembangunan di daerah dalam segala sektor pembangunan.

Ketersediaan informasi sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan suatu daerah. Berbagai jenis informasi sangat dibutuhkan guna mendukung setiap kebijakan/ langkah-langkah yang akan diambil oleh para decision maker (pengambil keputusan) mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil- hasil pembangunan.

Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau salah satu upaya guna memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan perekonomian, situasi, kondisi dan potensi suatu daerah. Informasi ini diharapkan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi perencana daerah dan bahkan

dapat digunakan sebagai masukan/bahan didalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan di daerah.

Sebagai rasa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Berau kepada masyarakatnya, dan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Berau yang berusaha mensejahterakan masyarakat menjadi target dari segenap upaya pembangunan yang dilaksanakan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang komprehensif. Berbagai infrastruktur/fasilitas penunjang kegiatan ekonomi terus diupayakan seperti pasar, pusat pertokoan, termasuk rehabilitasi dan pengadaannya. Bantuan program pemberdayaan ekonomi rakyat juga dilakukan dan didistribusikan sedemikian rupa sehingga membantu kelangsungan aktivitas produksi diberbagai unit kegiatan usaha disemua sektor.

Intensitas pengaruh dari gejolak ekonomi berdampak sangat relatif, dan beradaptasi seiring waktu termasuk dengan hal-hal yang mempengaruhi dari kapasitas dan skala ekonomi suatu wilayah. Bagi wilayah-wilayah dengan basis ekonomi berskala kecil/mikro imbas fluktuasi nilai tukar rupiah, perubahan suku bunga kredit perbankan dan lain-lain dapat dikatakan relatif minimal.

Harga barang dan jasa yang meningkat jelas sangat mempengaruhi permintaan sehingga secara keseluruhan kurang memback-up gerak aktivitas ekonomi dari pelaku ekonomi yang ada. Situasi yang tidak menentu tersebut memang tidak bersifat permanen karena pasar bersifat dinamis, namun pada umumnya keseimbangan pasar membutuhkan masa adaptasi yang relatif panjang (tidak spontan).

Dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang sulit diprediksi maka indikator makro ekonomi regional seperti statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Data PDRB selain perlu terus disusun dan disediakan secara teratur, pengkajian dan penelaahannya justru menjadi esensi dari upaya penyediaannya. Pencapaian pertumbuhan riil sektoral dan perkembangannya menyodorkan sejumlah permasalahan untuk dipecahkan melalui tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal ini kualitas dan obyektivitas data harus menjadi perhatian. Hasil perhitungan atau penyusunan merupakan produk dari data dasar.

Gambaran perekonomian daerah Kabupaten Berau selanjutnya dapat ditelaah pada data PDRB dan turunannya yang disajikan pada tabel-tabel lampiran buku ini.

Dalam suatu pemerintahan tentu berkeinginan untuk mengetahui hasil pembangunan yaitu dengan cara mengevaluasi bagaimana proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode demi periode tertentu. Salah satunya adalah Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Wikipedia Indonesia). Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan jumlah penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Sedangkan Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya di Kabupaten Berau guna mensejahterakan masyarakat. Salah satu alat atau indikator untuk melihat keberhasilan Pemerintah dalam bidang ekonomi salah satunya adalah bagaimana perkembangan ekonomi dan seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain (Wikipedia Indonesia):

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya terutama dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi

perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu tolok ukur perbaikan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan PDRB atau yang lebih familiar dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan PDRB terbagi dua, yang pertama yaitu pertumbuhan PDRB atas dasar harga (adh) berlaku, yakni pertumbuhan yang dihitung dengan harga berlaku/harga pasar, dan sering dikatakan sebagai pertumbuhan semu karena didalamnya masih mengandung besaran inflasi. Yang kedua adalah pertumbuhan PDRB atas dasar harga (adh) konstan, yang merupakan pertumbuhan riil atau pertumbuhan sesungguhnya, karena mengabaikan kenaikan harga barang dan jasa.

Pembangunan struktur ekonomi regional yang ideal melalui sesuatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi dan kebijakan, agar keputusan yang diambil dapat mencapai sasaran yang optimal dan tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, data statistik mempunyai peranan yang penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil-hasil yang telah dicapai sekaligus untuk menentukan kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah pada bulan januari 2001, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri. Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagi indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan daerah.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu priode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah/daerah pada priode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai dasar.

Dalam melakukan analisa ekonomi atau analisa kegiatan usaha perusahaan haruslah diperkirakan apa yang terjadi dalam bidang ekonomi atau dalam bidang dunia usaha pada masa yang akan datang. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita kenal apa yang disebut peramalan (*forecasting*).

Berbagai indikator dan informasi data yang relevannya tinggi perlu dikumpulkan, diolah dan disajikan, sehingga mampu mencerminkan aspek yang benar terhadap gejala yang sedang dan akan terjadi.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat , perlu disajikan statistik regional secara berkala, khususnya dibidang ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun swasta. Maka salah satu indikator yang mampu mengukurnya adalah dengan perhitungan tingkat kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Angka -angka pendapatan regional dapat dipakai sebagai bahan informasi yang mampu menjadikan acuan perencanaan pembangunan, khususnya dibidang ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta.

Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi dan pola struktur perekonomian pada satu tahun atau periode tertentu pada suatu Negara atau daerah tertentu.

Tingkat kesejahteraan , penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita serta investasi disuatu daerah sering dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi

didaerah tersebut. Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemakmuran rakyatnya, karena dengan membangun ekonomi yang kuat maka pertumbuhan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik akan terwujud. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi secara baik dan terarah, pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam pembangunan ekonomi memerlukan dasar –dasar perencanaan yang lebih baik. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan uptodate akan sangat menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Karena data dan informasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi berbagai program serta kebijakan yang diambil pemerintah.

Dalam aktifitas secara makro terdapat beberapa faktor yang kinerjanya saling mempengaruhi dan masing - masing mempunyai ciri dan peranannya sendiri yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta ( produksi ) dan sektor pemerintah.

Ekonomi Makro atau Makro Ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga ( household ), perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti **Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas harga, tenaga kerja** dan pencapaian **keseimbangan neraca** yang berkesinambungan.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan mengukur kinerja perekonomian terutama perkembangan sektor riil adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan dihitung menurut sektor / lapangan usaha menunjukkan besarnya kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah akibat adanya proses produksi. Nilai tambah yang terbentuk dari setiap kegiatan ekonomi tersebut menunjukkan sruktur perekonomian disuatu daerah. Nilai tambah ini merupakan indikator makro yang akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan metode statistik.

Sektor rumah tangga ( masyarakat ) berkaitan erat dengan dengan sektor produksi,

dalam penyediaan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja (skill), tanah dan modal. Adapun sektor produksi selanjutnya memberikan imbalan kepada rumah tangga dalam bentuk upah / gaji, sewa, rente yang nilai sebesar produksi yang dihasilkan sektor produksi. Sedangkan pengeluaran sektor rumah tangga akan menjadi pendapatan dari sektor produksi.

Selain itu pengeluaran rumah tanggapun digunakan dalam bentuk tabungan (saving). Tabungan pada lembaga keuangan akan membantu peningkatan aktivitas investasi apabila digunakan untuk penambahan permodalan bagi sektor produksi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan adanya peningkatan sektor produksi, pada akhirnya terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga.

Pendapatan sektor rumah tangga dipengaruhi oleh transfer berupa subsidi namun juga dibebani oleh pajak yang harus dibayar. Pajak tersebut selanjutnya akan menjadi pendapatan bagi pemerintah yang juga digunakan untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan transfer subsidi.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengontrol dan mengedalikan aktivitas perekonomian. Melalui kebijakannya, Pemerintah mempengaruhi variabel-variabel ekonomi agregat untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Permasalahan dalam perekonomian secara garis besar mencakup :

- a. Jangka pendek : Menjaga stabilitas perekonomian antara lain inflasi dan mengendalikan pengangguran.
- b. Jangka panjang : Mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi dan tersedianya dana untuk investasi.

#### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

Kebijakan pembangunan Indonesia Bidang Ekonomi dalam jangka panjang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan secara nyata untuk

perekonomian yang tangguh dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari bangsa – bangsa lain yang lebih maju.

Untuk itu dukungan dari kebijakan ekonomi regional sangat menentukan terwujudnya cita-cita tersebut. Kebijakan ekonomi regional harus diarahkan dan disinergikan dalam rangka memperkuat perekonomian domestik.

Komitmen kebijakan pemerintahan dan pembangunan adalah memelihara stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan memantapkan sektor keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan melalui penciptaan iklim dan investasi yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan kondisi tersebut menstimulus perbaikan kinerja ekonomi daerah dan selanjutnya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perbaikan perekonomian masyarakat secara umum.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut maka data statistik mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu data statistik yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ).

PDRB dibutuhkan sebagai indikator ekonomi makro regional yang bisa mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Besaran PDRB pada suatu tertentu dapat digunakan sebagai cerminan kinerja perekonomian dan sebagai gambaran struktur

ekonomi suatu daerah, sedangkan perbandingan PDRB antar waktu bisa digunakan sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

## **1.2 Konsep dan Definisi**

Berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan PDRB dan Produk Domestik Regional neto ( PDRN), pendapatan regional dan PDRB per kapita, serta istilah – istilah lain yang terkait.

### **1.2.1 Output**

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu meliputi produk utama, produk ikutan, maupun produk sampingan. Output mencakup juga barang sisa, margin penjualan barang bekas, margin perdagangan dan biaya lainnya, bunga yang termasuk di dalam nilai penjualan secara kredit, imputasi biaya atas pelayanan bank dan lembaga keuangan lainnya, imputasi sewa untuk bangunan tempat tinggal milik sendiri, dan barang dan jasa yang diproduksi untuk digunakan sendiri dengan unit harganya.

Output dari produsen jasa pemerintah adalah total pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah yang merupakan jumlah belanja barang dan jasa, upah dan gaji, serta penyusutan modal pemerintah.

Output dari lembaga swasta nirlaba yang melayani rumahtangga adalah jumlah pengeluaran untuk menghasilkan jasa lembaga swasta nirlaba yaitu biaya antara, upah dan gaji, penyusutan serta pajak tak langsung.

- **Biaya Antara**

Biaya antara adalah biaya yang dikeluarkan untuk barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Barang tidak tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur kurang dari satu tahun. Perusahaan yang memberikan barang dan jasa kepada pegawai tidak dimasukkan sebagai biaya antara tetapi dimasukkan ke dalam balas jasa pegawai.

Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban berdasarkan perjanjian diperlukan sebagai biaya antara. Contoh: pembelian peralatan kerja buruh tambang dan tani atas dasar suatu kontrak diperlakukan sebagai biaya antara.

- **Nilai Tambah**

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi yang digunakan sebagai input antara yang terdiri dari komponen pendapatan faktor, penyusutan barang modal tetap, dan pajak tak langsung neto. Pada umumnya nilai tambah ini sama dengan balas jasa faktor produksi. Jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto diperoleh nilai tambah neto. Pada umumnya nilai tambah bruto merupakan pengurangan biaya antara terhadap output. Nilai Tambah Bruto (NTB) inilah nantinya yang akan disebut sebagai PDRB.

- **Penyusutan**

Penyusutan adalah nilai susut atau ausnya barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.

- **Agregat PDRB**

- Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Harga Pasar adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah, jika nilainya dikurangi penyusutan ataupun pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi (pajak tak langsung neto) akan sama dengan:
- Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor adalah jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai ini ditambah dengan pendapatan yang masuk dan dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar wilayah ini akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atau biasa disebut pendapatan regional.

- Jika pendapatan regional tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah tersebut akan diperoleh Pendapatan Regional Per Kapita.

### 1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) adalah jumlah nilai tambah ( value added ) yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah / region dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. Untuk menghitung PDRB suatu wilayah / region terdapat 3 ( tiga ) pendekatan yaitu : Pendekatan Produksi ( *Production Approach* ), pendekatan Pendapatan ( *Incom approach* ), pendekatan Pengeluaran ( *Expenditure Approach* ).

- a. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap unit usaha di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Atau
- b. dapat juga dikatakan bahwa PDRB merupakan total selisih nilai output barang dan jasa dengan biaya antara.
- c. Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Balas jasa tersebut adalah upah / gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Kesemuanya dinilai sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam penghitungan ini termasuk juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto.
- d. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba ( C ), Konsumsi Pemerintah ( G ), Pembentukan Modal Tetap Bruto ( I ) Ekspor Netto ( X- M ), dan Perubahan Stok (  $\Delta$  Stok). Secara sistematis penghitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dapat dituliskan dalam persamaan berikut.

$$Y = C + G + I + ( X-M) + \Delta \text{ Stok}$$

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah sama dengan jumlah pengeluaran untuk berbagai keperluan. PDRB tersebut selanjutnya disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena masih mencakup pajak tak langsung neto.

### **1.2.3 Produk Domestik Regional Neto ( PDRN )**

Produk Domestik Regional Neto ( PDRN ) adalah PDRB dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan ( depresiasi ) adalah besarnya penurunan nilai barang modal tetap akibat penggunaannya dalam proses produksi suatu barang / jasa.

### **1.2.4 Pendapatan Regional**

Apabila PDRN dikurangi pajak tak langsung neto maka akan menghasilkan nilai Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor ( PDRN adbf ). Pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi. Pajak tak langsung berpengaruh menaikkan harga jual suatu barang / jasa, sedangkan subsidi berpengaruh sebaliknya.

Selanjutnya apabila produk regional neto atas dasar biaya faktor ditambah dengan pendapatan faktor neto ( net faktor income ) maka akan menghasilkan nilai pendapatan regional.

Pendapatan faktor neto adalah selisih arus pendapatan yang mengalir kedalam suatu wilayah / region dikurangi arus pendapatan keluar wilayah / region, dalam hal ini Kabupaten Berau. Dengan demikian balas jasa faktor produksi milk penduduk Kabupaten Berau yang berada di luar Kabupaten harus dihitung sebagai penambah dalam penghitungan, sedangkan balas jasa faktor produksi milik penduduk luar Kabupaten yang berada di Kabupaten Berau harus dihitung sebagai pengurang dalam penghitungan.

Secara teori, pendapatan regional inilah yang seharusnya menjadi indikator pendapatan yang benar – benar diterima oleh penduduk Kabupaten Berau. Akan tetapi sampai dengan sa'at ini penghitungan pendapatan yang benar – benar diterima oleh penduduk Kabupaten Berau belum dapat dilakukan karena masih belum tersedianya data

pendapatan faktor neto. Berkaitan dengan hal tersebut penghitungan yang disajikan dalam publikasi ini baru sampai dengan PDRB hingga PDRN atas dasar biaya faktor.

### **1.2.5 PDRB Perkapita**

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB perkapita merupakan indikator tingkat kemakmuran masyarakat yang banyak digunakan karena indikator – indikator lain yang sejenis dan lebih baik belum tersedia, meskipun indikator ini bukan yang paling ideal. Hal ini dikarenakan dalam penghitungan PDRB masih ada komponen – komponen yang tidak dinikmati oleh masyarakat suatu daerah tersebut.

### **1.2.6 Perubahan Tahun Dasar**

Sampai saat ini penghitungan PDRB di Indonesia telah dihitung menggunakan empat tahun dasar yaitu 1960, 1973, 1983, dan 1993. Penggunaan tahun dasar 1993 dimulai sejak penghitungan PDRB tahun 1994 dengan alasan yang mendasarinya, di antaranya dianggap bahwa perkembangan ekonomi selama 10 tahun terakhir tersebut berkembang dengan pesat. Namun mulai tahun 2003 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2000 hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 dipandang relatif stabil dengan laju pertumbuhan PDB sebesar 4,92 persen dan inflasi pada posisi 9,35 persen. Sejak tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi secara agregat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan besaran positif. Hal ini memberi makna sebagai awal berjalannya proses pemulihan ekonomi setelah mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi yang membuat PDB merosot pada tingkat minus 13,13 persen di tahun 1998 dengan inflasi hingga mencapai 77,63 persen.

Untuk keseragaman penghitungan PDRB seluruh Kabupaten di Indonesia, Badan Pusat Statistik menganjurkan agar mulai tahun 2000 penghitungan PDRB yang baru dengan

tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar di atas, yang berlaku untuk seterusnya dilakukan karena perekonomian tahun 1993 sebagai tahun dasar, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian pada saat sekarang, baik yang menyangkut perkembangan harga, pola produksi dan konsumsi maupun jenis kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Penentuan tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar baru juga didasarkan pada pengamatan bahwa perekonomian pada tahun 2000 pada skala nasional maupun regional cukup normal dan memadai.

Secara khusus alasan yang melatarbelakangi perubahan/pergeseran tahun dasar tersebut ialah :

- **Alasan teknis**

- Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi makin tidak realistis karena perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi PDRB tahun dasar 1993 menjadi *underestimate* (kerendahan).
- Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi dan birokratisasi. Sektor pertanian dan pertambangan sangat dominan, sementara sektor industri relatif masih kecil peranannya. Sejak tahun 1991 sektor industri peranannya sudah melampaui sektor pertanian dan menjadi primadona perekonomian Indonesia.
- Walaupun pertumbuhan sektor industri jauh lebih tinggi dari sektor pertanian, tetapi karena bobot sektor industri pada tahun 1993 jauh lebih rendah dari sektor pertanian, akibatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menjadi makin tidak realistis apabila kita makin jauh dari tahun 1993. Struktur perekonomian Indonesia dewasa ini makin bergeser ke sektor-sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi.
- Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku panduan "Sistem Neraca Nasional" yang baru dinyatakan bahwa estimasi PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik

dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5 dan hal ini juga didukung oleh komitmen pimpinan BPS negara-negara ASEAN tahun 2000. Hal ini dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.

- Karena cakupan terus disempurnakan, dalam jangka tujuh tahun juga telah terjadi perubahan struktur/bentuk komoditas serta kombinasi harga yang sangat signifikan. Perbaikan cakupan di sektor pertanian (tanaman bahan makanan dan perkebunan) dan perubahan komoditi umumnya di sektor industri pengolahan (elektronik/teknologi informatika). Di sisi lain terjadi perubahan dalam komposisi harga antar sektor primer, sekunder, dan tersier.
- Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik masih dalam periode tersebut. Pada pertengahan tahun 1997 hadirnya krisis ekonomi juga berdampak kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Secara ringkas bisa dinyatakan bahwa struktur perekonomian tahun 2000 telah berbeda dari tahun 1993. Untuk itu, pemutakhiran tahun dasar penghitungan PDRB tahun 1993 ke tahun 2000 menjadi perlu dilakukan agar hasil estimasi PDRB sektoral maupun penggunaan akan menjadi realistis, dalam pengertian mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena pergeseran struktur produksi lintas sektor.
- Pada tahun 2000, BPS telah merampungkan penyusunan Tabel Input-Output Indonesia tahun 2000. Tabel I-O tersebut secara baku dipakai sebagai basis bagi penyusunan series baru penghitungan PDRB baik sektoral maupun penggunaan. Besaran PDRB yang diturunkan dari Tabel I-O telah mengalami uji konsistensi pada tingkat sektoralnya dengan mempertimbangkan kelayakan struktur permintaan maupun penawarannya. Oleh karena itu, struktur perekonomian Indonesia yang

digambarkan melalui tabel I-O tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka dasar (*bench marking*) bagi penyempurnaan penghitungan estimasi PDRB.

- Ketersediaan data dasar (*raw data*) baik harga maupun volume (*quantum*) tahun 2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan dibanding kondisi pada tahun 1993. Hal itu dimungkinkan karena berbagai departemen/kementerian maupun instansi pemerintah lainnya turut membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoralnya masing-masing. Dengan dukungan data-data yang lebih lengkap dan terinci serta berkesinambungan diharapkan estimasi PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.
- Pergeseran Struktur Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 dipandang relatif stabil dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 4,92 persen dan inflasi pada posisi 9,35 persen. Sejak tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi secara agregat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan besaran positif. Hal itu bisa disebut sebagai awal berjalannya proses pemulihan ekonomi setelah keterpurukan akibat krisis ekonomi yang membuat PDB merosot sampai pada tingkat minus 13,13 persen di tahun 1998 dengan inflasi hingga mencapai 77,63 persen di tahun tersebut.
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2001

Berdasarkan angka sementara PDB atas dasar harga konstan 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2001 sebesar 3,83 persen. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi melampaui angka tersebut.

### 1.2.7 Klasifikasi Sektor

Kegiatan yang terjadi di suatu daerah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan yang beraneka ragam ini perlu di kelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sama sehingga dapat ditentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kelompok kegiatan

ekonomi tertentu seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan sebagainya. Pengelompokan kegiatan ekonomi ini sering pula disebut sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha.

Pembagian klasifikasi ekonomi ke dalam sektor didasarkan pada kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam memproduksi, sifat, dan jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor penggunaan barang dan jasa yang bersangkutan. Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar wilayah, antar waktu, dan antar karakteristik tertentu dapat dilakukan.

Dalam upaya memperoleh keterbandingan data yang dihasilkan oleh berbagai Negara, PBB menerbitkan publikasi mengenai klasifikasi lapangan usaha yang berjudul "*International Standard Industrial Classification Of All Economic Activities*" (ISIC). Publikasi ini telah mendapat revisi beberapa kali sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pembagian sektor-sektor menjadi subsektor serta ruang lingkup dan definisinya disajikan dalam penerbitan BPS yang terangkum dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

### 1.3 Cara Penyajian

Penghitungan PDRB Kabupaten Berau dalam publikasi ini dilakukan dengan membagi aktifitas kegiatan ekonomi menjadi sembilan sektor / lapangan usaha. Adapun sektor / lapangan usaha tersebut adalah :

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik dan Air bersih
5. Bangunan / Konstruksi
6. Perdagangan
7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa – jasa

PDRB menurut sektor / lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konsta. Dalam penghitungan PDRB atas dasar berlaku, nilai tambah masing – masing sektor / lapangan usaha dilai atas dasar harga yang berlaku pada masing – masing tahun penghitungan,n sedangkan dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, nilai tambah dihitung dengan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2000.

#### **1.4 Metode Penghitungan**

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan metode langsung dan metode tak langsung ( alokasi ) dalam metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran, sebagaimana telah diuraikan pada poin 1.2.1.

Dalam metode tak langsung nilai tambah disuatu wilayah / region diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi wilayah / region yang lebih besar ke masing – masing tingkat wilayah / region yang lebih kecil. Sebagai alokator nilai tambah digunakan indikator yang dapat mewakili atau mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan ekonomi tersebut.

#### **1.5 Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa selain dihitung atas dasar harga berlaku, PDRB juga dihitung atas dasar harga konstan. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil, karena pengaruh perkembangan harga sudah hilangkan dalam proses penghitungan.

Untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan suatu kegiatan ekonomi dikenal ada empat metode yaitu Revaluasi, Ekstrapolasi, Deflasi dan deflasi berganda.

##### **1.5.1 Revaluasi**

Metode ini dilakukan dengan cara menilai output dan biaya antara pada

masing-masing tahun dengan harga tahun dasar tahun 2000. Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar biaya konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output dan biaya antara.

Dalam praktik sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak sehingga memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan umumnya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

### **1.5.2 Ekstrapolasi**

Dengan metode ekstrapolasi, nilai tambah suatu kegiatan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan mengalikankan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat berupa indeks dari masing-masing produk yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi lain seperti tenaga kerja, jumlah usaha dan indikator lain yang sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi yang dimaksud.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan, kemudian mengalikannya dengan rasio nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

### **1.5.3 Deflasi**

Nilai tambah atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator adalah indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar dan indeks lain yang relevan. Indeks harga tersebut dapat pula berarti sebagai inflator pada kondisi dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru

diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

#### **1.5.4 Deflasi Berganda**

Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan metode deflasi berganda, dilakukan dengan cara mendeflat output dan biaya antara, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan adalah indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

Kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia dengan lengkap. Oleh karena itu metode ini belum banyak digunakan dalam penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan.

#### **1.6 Analisis dan Kegunaan data PDRB**

Tabel merupakan suatu metode statistik untuk menyajikan data secara komprehensif. Tabel yang merupakan sumber informasi perlu diuraikan untuk dianalisis secara lebih spesifik. Dengan demikian, dalam analisis data PDRB akan disajikan tabel dan grafik yang dilengkapi dengan ulasannya. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pembaca melakukan evaluasi terhadap data PDRB. Tujuan utamanya adalah untuk menjabarkan hasil penghitungan PDRB kedalam bentuk yang relatif sederhana dengan menggunakan metode pendekatan statistik deskriptif.

Selain tujuan diatas, analisis PDRB juga bertujuan untuk :

- Mempelajari pola perekonomian daerah
- Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian lainnya dalam suatu daerah dan waktu yang sama

- Melakukan perbandingan antara komponen dengan kepentingan relatifnya
- Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang.

Beberapa indikator pokok ekonomi makro yang tertuang dalam PDRB sektoral serta kegunaannya antara lain ;

- **Nilai Nominal PDRB.** PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah (*region*). Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Nilai nominal PDRB yang dihasilkan suatu daerah sangat tergantung pada dua faktor tersebut, sehingga nilainya bervariasi antar daerah. Dari besaran nilai nominal PDRB dapat dilihat nilai tambah masing-masing sektor dan peranannya dalam membentuk perekonomian daerah.
- **Kontribusi/Peranan Sektor Ekonomi.** Kontribusi atau peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat perubahan dan pergeseran struktur sebagai indikator adanya proses pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian yang diikuti dengan kenaikan peran sektor industri.
- **Laju Pertumbuhan Ekonomi.** Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur

besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

- **PDRB/Pendapatan Regional Perkapita.** PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Sedang PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan perubahan kemakmuran.
- **Tingkat Perubahan Harga atau Inflasi/Deflasi.** Inflasi dan deflasi merupakan gambaran tentang perubahan harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli masyarakat/konsumen sebagai akibat dari “ketidakseimbangan pendapatan.” Untuk melihat adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan pada tingkat produsen dapat dilihat dari suatu indeks implisit yang diturunkan dari perhitungan indeks implisit yang merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan atau biasa disebut “PDRB Deflator Elastisitas Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.”
- **Elastisitas Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.** Apabila data PDRB dan data tenaga kerja disajikan secara series, maka dapat dihitung elastisitas kesempatan kerja terhadap PDRB. Elastisitas kesempatan kerja ini mencerminkan pengaruh kenaikan atau penurunan PDRB terhadap kesempatan kerja. Apabila data PDRB dan data ketenagakerjaan disajikan bersama-sama secara series dari waktu ke waktu, maka dapat dihitung angka elastisitas kesempatan kerja, baik secara total maupun secara sektoral, yang mencerminkan pengaruh kenaikan/penurunan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja.

- **Produktivitas Sektoral.** Apabila data ketenagakerjaan dapat disajikan secara sektoral, maka produktivitas tenaga kerja per sektor dapat dihitung dengan membagi nilai tambah masing-masing sektor dengan tenaga kerja yang bekerja pada sektor-sektor tersebut. Produktifitas sektoral ini sangat berguna untuk mempertimbangkan penentuan alokasi tenaga kerja secara sektoral.
- **Berbagai Macam Rasio.** Rasio merupakan salah satu bentuk metode statistik yang sederhana yang umumnya digunakan untuk melakukan perbandingan. Rasio-rasio yang sangat bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan pembangunan daerah ini dapat diturunkan dari angka PDRB, misalnya rasio antara penerimaan pajak dengan PDRB, rasio biaya pendidikan, rasio pengumpulan dana masyarakat, dan lain sebagainya.

### **1.7. Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud Penghitungan PDRB.**

Penghitungan dan penyediaan data statistik PDRB Kabupaten Berau Tahun 2013 dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi tentang kondisi perekonomian, kinerja dan perkembangan ekonomi daerah guna memenuhi kebutuhan dalam rangka perencanaan maupun perumusan sejumlah langkah kebijakan tindak lanjut operasional berikutnya.

#### **B. Tujuannya antara lain adalah :**

1. Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi daerah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui gambaran kinerja dan pencapaian aktivitas kegiatan ekonomi keadaan terakhir.
3. Untuk mendapatkan data pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang up to date.
4. Untuk dapat memenuhi kebutuhan data statistik ekonomi bagi seluruh pengguna data (users) dari berbagai kalangan masyarakat.

### **1.8. Metodologi, Cakupan, dan Ruang Lingkup**

Metodologi penghitungan dan penyusunan publikasi PDRB ini pada umumnya sama dengan

penyusunan tahun-tahun sebelumnya yaitu pendekatan produksi yang menghasilkan PDRB menurut lapangan usaha, dan pendekatan pengeluaran yang menghasilkan PDRB menurut penggunaan.

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan bersumber dari Dinas/Instansi/Kantor/Badan, dan Lembaga-lembaga terkait yang ada di daerah, serta data lintas region yang penyediaannya oleh institusi lingkup nasional dan regional propinsi. Struktur biaya dalam rangka mendapatkan data rata-rata biaya antara (rate of intermediate cost) diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR).

Sedangkan cakupan dan ruang lingkup penghitungan PDRB Kabupaten Berau adalah wilayah Kabupaten Berau mencakup 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha.

Kesembilan sektor ekonomi/lapangan usaha tersebut adalah:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan/Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Telekomunikasi
8. Bank/Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Beberapa konsep dan definisi tentang hal-hal di atas lebih lanjut dimuat pada Bab II.

## BAB II

### KONSEP, DEFINISI , METODOLOGI DAN URAIAN SEKTORAL

#### PENGHITUNGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Beberapa konsep, definisi dan istilah-istilah serta metodologi yang dipergunakan dalam penghitungan PDRB menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

#### 2.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

2.1.1 **Produk Domestik** adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi disuatu wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari/atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik.

#### 2.1.2. Produk Regional

Mengingat faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu wilayah tidak hanya berasal atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut namun juga berasal atau dimiliki oleh penduduk wilayah lain maka timbul aliran arus pendapatan antar wilayah/daerah sehingga pengertian produk domestik tidak sama dengan produk regional. Yang dimaksud dengan produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayar ke luar daerah/negeri. Jadi Produk Regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah.

#### 2.2. AGREGAT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produksi barang dan jasa timbul karena adanya kegiatan proses produksi yang melibatkan faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, kewiraswastaan). Output produksi sudah termasuk biaya produksi sehingga hasil dari kegiatan proses produksi tersebut adalah nilai produksi dikurangi biaya antara (Intermediate Cost) yang diistilahkan dengan Nilai Tambah (Value Added). Dengan demikian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang timbul karena kegiatan proses produksi dari seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Nilai Tambah

Bruto disini mencakup komponen-komponen balas jasa terhadap faktor produksi yaitu sewa tanah, bunga, upah gaji dan keuntungan serta penyusutan dan pajak tidak langsung netto.

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai PDRB termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung netto.

2.2.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai PDRB tidak termasuk nilai penyusutan (PDRB minus nilai penyusutan).

2.2.3. Pendapatan Regional Netto (PRN) atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung netto (PDRB minus penyusutan dan pajak tidak langsung netto).

2.2.4. Pendapatan Regional adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk suatu wilayah yaitu PDRN atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang keluar ditambah dengan pendapatan yang masuk.

2.2.5. Pendapatan per kapita adalah Pendapatan Regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

**2.3.** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan nilai PDRB dimana penghitungan nilai seluruh item berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu. Dalam hal ini perubahan harga terakomodasi.

**2.4.** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan nilai PDRB riil karena kuantum barang dan jasa dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada tahun dasar (tidak termasuk pengaruh perkembangan harga).

**2.5.** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha adalah penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi dimana setiap sektor/ lapangan usaha dihitung nilai tambahnya selama kurun waktu satu tahun. Jumlah nilai tambah seluruh sector merupakan nilai PDRB daerah tersebut pada tahun yang bersangkutan.

## **2.6. METODOLOGI**

Metodologi penghitungan PDRB menurut lapangan usaha secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.6.1. Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode yaitu:

- a. Metode langsung: dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang bersangkutan.
- b. Metode tidak langsung: dengan cara alokasi PDRB propinsi, menggunakan beberapa indikator produksi dan indikator lainnya yang relevan selaku alokator.

Penghitungan dengan metode langsung menggunakan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung dengan menggunakan alokator antara lain berupa nilai produk bruto/netto setiap sektor, jumlah produk fisik, tenaga kerja, penduduk dan lainnya yang cocok/ sesuai.

#### **2.6.2. Metode penghitungan PDRB atas dasar harga konstan antara lain dilakukan dengan**

**cara:**

- a. Revaluasi yaitu mengalikan kuantum tahun berjalan dengan harga tahun dasar. Menyangkut biaya antara karena komponennya sangat banyak maka penghitungannya dilakukan dengan cara perkalian output pada masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara.
- b. Ekstrapolasi: mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi sebagai ekstrapolator.
- c. Deflasi: membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga sebagai deflator.
- d. Deflasi berganda: Yang dideflasi adalah output dan biaya antara, sedangkan nilai tambahnya diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut.

### **2.7. BATASAN SEKTORAL**

#### **2.7.1. Sektor Pertanian**

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup). Yang termasuk dalam sektor pertanian adalah sub sektor Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan:

- a. Tanaman bahan makanan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang kedelai, kacang tanah, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya.
- b. Tanaman perkebunan mencakup semua jenis kegiatan ekonomi yang mengusahakan tanaman perkebunan baik oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan dengan jenis komoditi seperti cengkeh, kakao, jambu mete, kapas, kapuk, kayu manis, kelapa, kemiri, kopi, vanili, tembakau, tebu dan tanaman perkebunan lainnya.
- c. Peternakan dan hasil-hasilnya meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya semua jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya baik yang dilakukan oleh rakyat, maupun oleh perusahaan peternakan.
- d. Kehutanan meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran termasuk juga kegiatan perburuan.
- e. Perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya baik yang berada di air tawar maupun di air asin serta payau.

### **2.7.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup pemboran, penggalian, pencucian, dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalian dapat dilakukan di bawah tanah, maupun di atas permukaan bumi. Termasuk kegiatan penggalian disini adalah pembuatan garam kasar dengan cara menguapkan air laut.

Sektor pertambangan dan penggalian dibagi menjadi sub sektor pertambangan migas (minyak dan gas bumi), Pertambangan Non Migas (batu bara, pasir besi, biji timah, biji nekel, tembaga, emas, perak dan lain-lain), dan Penggalian (batu kali, pasir, kerikil dan lain-lain) atau bahan galian C.

### **2.7.3. Sektor Industri**

Kegiatan industri adalah kegiatan untuk mengubah bentuk baik teknis maupun kimiawi dari bahan organik atau non organik menjadi bentuk baru yang lebih tinggi nilainya. Prosesnya dapat dilakukan dengan mesin atau tangan baik dibuat di dalam sebuah pabrik maupun dilingkungan rumahtangga.

Sektor Industri Pengolahan dikelompokkan menurut banyaknya tenaga kerja yaitu:

- a. Industri besar adalah perusahaan industri dengan tenaga kerja  $\geq 100$  orang.
- b. Industri sedang adalah perusahaan industri dengan tenaga kerja 20-99 orang.
- c. Industri kecil adalah usaha industri dengan tenaga kerja 5- 19 orang.
- d. Industri kerajinan rumahtangga dengan tenaga kerja  $< 5$  orang.

### **2.7.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih terdiri atas sub-sektor**

- a. Listrik yaitu kegiatan yang mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik baik yang diselenggarakan oleh PLN maupun Non PLN dengan tujuan untuk dijual.
- b. Air bersih yaitu kegiatan yang mencakup proses pembersihan, pemurnian, dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan atau alat lain ke rumahtangga, instalasi pemerintah maupun swasta.

### **2.7.5. Sektor Bangunan/ Konstruksi**

Sektor bangunan/konstruksi mencakup semua kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya. Kegiatan di sektor bangunan dapat dilakukan oleh perusahaan konstruksi (kontraktor) ataupun oleh perorangan.

### **2.7.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.**

- a. Kegiatan yang dicakup dalam sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun barang bekas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah sifat barang tersebut.

- b. Restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan seperti rumah makan, warung nasi, warung sate, warung kopi, catering dan kantin.
- c. Hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan seperti hotel berbintang, hotel non bintang, losmen, motel dan sebagainya.

2.7.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi meliputi sub sektor:

- a. Angkutan jalan raya meliputi kegiatan angkutan barang dan penumpang, dengan menggunakan alat angkut kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, termasuk kegiatan carter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi.
- b. Angkutan laut meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi didalam dan diluar daerah domestik.
- c. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan adalah kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta penyeberangan dengan alat angkutan Ferry, termasuk kegiatan carter/penyewaan kapal dengan atau tanpa pengemudi.
- d. Angkutan udara meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di daerah tersebut.
- e. Jasa penunjang angkutan seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, parkir, bongkar muat, keagenan, ekspedisi, jalan tol dan lain-lain.
- f. Komunikasi mencakup Pos dan Giro, serta usaha telekomunikasi telepon dan lain sebagainya.

2.7.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

- a. Bank adalah kegiatan pemberian jasa keuangan pada pihak lain seperti menerima simpanan, memberikan kredit, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga dan lain-lain.

- b. Lembaga keuangan Bukan Bank mencakup kegiatan Asuransi dana pensiun, pegadaian, money changer, koperasi simpan pinjam dan sebagainya.
- c. Persewaan mencakup usaha persewaan bangunan dan tanah seperti perkantoran, pertokoan dan lain-lain.
- d. Jasa perusahaan mencakup kegiatan pemberian jasa hukum, jasa akuntansi, jasa pengolahan data, jasa teknik, jasa periklanan, jasa riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan peralatan dan sebagainya.

#### 2.7.9. Sektor Jasa-Jasa

- a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/ lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang PDRB Kabupaten Lombok Timur Menurut Lapangan Usaha dan Penggunaan Tahun 2005-2009 12 berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan.
- b. Jasa Sosial Kemasyarakatan meliputi jasa pendidikan, kesehatan, riset/ penelitian, palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah ibadah dan lain-lain.
- c. Jasa hiburan dan rekreasi meliputi kegiatan produksi dan distribusi film komersial, dokumenter untuk kepentingan pemerintah, serta film video, jasa bioskop dan panggung hiburan, studio radio, perpustakaan, museum, gedung olah raga, kolam renang, lapangan tenis, klub malam dan lain sebagainya.
- d. Jasa perseorangan dan rumah tangga mencakup segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga seperti jasa reparasi kendaraan bermotor, reparasi jam, radio, televisi, mesin jahit, sepeda dan sebagainya. Yang termasuk sub sektor ini juga adalah jasa pembantu rumah tangga, tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu dan lain-lain.

#### 2.8. Pengertian Suatu Wilayah

***Wilayah Domestik dan Regional*** Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah

transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

**Produk Domestik** Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

**Produk Regional** **Produk regional** merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

**Residen dan Non-Residen** Unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga non-profit, dikatakan sebagai residen bila mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga non profit tersebut mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah jika memiliki tanah/bangunan atau melakukan kegiatan

produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun). Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang konsep residen dan non-residen suatu unit institusi adalah antara lain,

A. ***Penduduk suatu daerah*** adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik daerah tersebut, kecuali :

- wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) daerah lain yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 1 tahun yang bertujuan untuk bertamasya atau berlibur, berobat, beribadah, kunjungan keluarga, pertandingan olahraga nasional/internasional dan konferensi-konferensi atau pertemuan lainnya, dan kunjungan dalam rangka belajar atau melakukan penelitian;
- awak kapal laut dan pesawat udara luar negeri/luar daerah yang kapalnya sedang masuk dok atau singgah di daerah tersebut;
- pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 1 tahun, pegawai perusahaan asing dan pegawai perusahaan daerah lainnya yang berada di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 1 tahun, misalnya untuk tujuan memasang jembatan atau peralatan yang dibeli dari mereka;
- pekerja musiman yang berada dan bekerja di wilayah domestik daerah tersebut, yang bertujuan sebagai pegawai musiman saja;
- anggota Korps Diplomatik, konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut;

B. ***Organisasi internasional*** adalah bukan residen di wilayah dimana organisasi tersebut berada namun pegawai badan internasional/nasional tersebut adalah bukan penduduk daerah tersebut jika melakukan misi kurang dari 1 tahun.

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar**  
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

**Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar**  
Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

**Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor**  
Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi

pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

***Pendapatan Regional*** Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan

yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.

***Pendapatan Regional Perkapita*** Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

***Menurut Pendekatan Produksi*** PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Bersih
- Konstruksi
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

**Menurut Pendekatan Pendapatan** PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

**Menurut Pendekatan Pengeluaran** PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- pengeluaran konsumsi pemerintah
- pembentukan modal tetap domestik bruto
- perubahan inventori, dan
- ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

### **Metode Penghitungan**

#### **Revaluasi**

Quantum X Harga

#### **Deflasi**

Perubahan Inv. Adhb: Indeks Harga

## **Ekstrapolasi**

Δ Inv.tahun dasar Adhk: Indeks Quantum

Biaya antara diperoleh dari hasil perkalian output jasa swasta dengan rasio biaya antara terhadap output. Data output per unit usaha, tenaga kerja dan rasio biaya antara diperoleh dari hasil sensus ekonomi dan Survey Khusus Sektoral ( SKS ), sedangkan jumlah tenaga kerja berdasarkan pada IDSS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk jasa sosial dan kemasyarakatan dihitung dengan metode ekstrapolasi dengan ekstrapolator jumlah tenaga kerja, sedangkan untuk jasa hiburan dan kebudayaan serta jasa perorangan dengan rumah tangga dengan metode deflasi dengan deflator IHK aneka barang dan jasa.

### **BAB III**

## **TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BERAU**

### **3.1. Tinjauan Umum**

Pelaksanaan skema kerja sama Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) semakin dekat sekitar 18 bulan lagi. Peningkatan kerja sama antar Negara ASEAN ini perlu disambut dengan kesiapan yang paripurna Masyarakat Ekonomi Asean sebagai pasar dan basis produksi yang tunggal, berdaya saing tinggi, serta mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata. Persiapannya tidak terbatas pada konektivitas pada prasarana dan sarana ekonomi, namun juga konektivitas factor factor produksi agar Indonesia memperoleh manfa'at dari berlangsungnya transformasi arus barang, jasa, tenaga ahli serta modal menjadi lebih bebas di ASEAN.

Proses transformasi tersebut akan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antar Negara ASEAN pada berbagai sector yang berlangsung selama ini. Migrasi pekerja Indonesia kenegara tetangga, Singapura dan Malaysia, telah berlangsung massif. Sementara perusahaan Indonesia mulai banyak berinvestasi di Vitnam demikian pula sebaliknya semakin banyak perusahaan Malaysia dan Singapura memperluas usaha di Indonesia. Perkembangan arus factor produksi ini akan berperan penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan antar Negara ASEAN.

Masalah pemerataan tersebut membawa kita pada pentingnya membangun sumber Daya Manusia yang berkualitas pada sektor produksi dalam jangka menengah. Setruktur neraca perdagangan kita menunjukkan ketergantungan yang semakin besar pada ekspor komoditas Sumber Daya Alam, sementara impor barang antara, barang modal , serta jasa - jasa terus meningkat. Kalangan dunia usaha telah memberikan sinyal salah satu penyebab utamanya yaitu kekurangan tenaga manajerial dan ahli teknik pada sector pertambangan, pertanian, perikanan dan industry.

Kondisi deficit tenaga berkualitas dan jumlah penganggur berpendidikan sarjana dan menengah yang masih belum menunjukkan keterkaitannya output dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, selain itu juga mencerminkan belum efektifnya kebijakan insentif fiskal dan moneter mengangkat kegiatan pengembangan teknologi dan pembiayaan pada sector produksi, sementara dukungan infrastruktur dan system logistic belum memadai. Menimbang besaran masalah Sumber Daya Manusia tersebut maka strategi pembangunan “ Pick up the winner “ kiranya perlu ditempuh dengan tuntutan daya saing yang makin tinggi. Program seperti “Certified Farmers “ di Jepang dapat di jadikan panduan. Dunia usaha yang unggul terus didorong untuk membangun jaringan produksi dalam negeri dan luar negeri. Upaya tersebut jika diiringi dengan bertambahnya ketersediaan tenaga kerja Indonesia yang makin berkualitas dan keseimbangan neraca perdagangan, akan mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari kompetisi menjadi kolaborasi terhadap Masyarakat Ekonomi Asean.

Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang, sering disebut dengan structural bottlenecks. Struktural bottleneck terutama terjadi dalam tiga hal, yaitu :

1. **Supply dari sektor pertanian** (pangan) tidak elastis. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi supply dari sektor pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
2. **Cadangan valuta asing yang terbatas** (kecil) akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor. Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang- barang baik bahan baku; input antara; maupun barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri menjadi terbatas pula. Belum lagi ditambah dengan adanya demonstration effect yang dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari lambatnya laju

---

pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan supply barang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.

3. **Pengeluaran pemerintah terbatas.** Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan, akibatnya timbul defisit anggaran belanja, sehingga seringkali menyebabkan dibutuhkan- nya pinjaman dari luar negeri ataupun mungkin pada umumnya dibiayai dengan pencetakan uang (printing of money).

**Inflasi adalah** Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.

**Indeks Harga konsumen (IHK):** ialah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

#### **Dampak Inflasi Terhadap pertumbuhan Ekonomi**

**Dampak Inflasi** - Inflasi merupakan kenaikan harga secara bersamaan atau secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi disebabkan karena munculnya tiga hal, permintaan meningkat sedangkan barang barang yang dicari terbatas, harga meningkat sedangkan produksinya minim, dan peningkatan jumlah produksi disertai dengan peningkatan permintaan.

Dampak inflasi pada pembangunan perekonomian tentu ada. Apa efeknya?

#### **Dampak dari Perekonomian Terhadap Inflasi**

Beberapa dampak inflasi terhadap pembangunan perekonomian, sebagai berikut:

**1. Investasi meningkat dan mengurangi produksi** Pada waktu inflasi, pemerintah dengan sengaja membuat kebijakan, bank menaikkan tingkat suku bunga dengan tujuan untuk banyak orang yang akan selamat, sehingga uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun. Di satu pihak, ini memang dapat menyelesaikan masalah, yaitu mengurangi uang beredar dalam masyarakat, yang akan meredam inflasi. Tapi di sisi lainnya, masyarakat

akan berinvestasi lebih berbentuk deposit daripada bekerja. Sebagian kalangan bahkan berpikir "*Kenapa harus repot membuka bisnis? Hanya dengan menabung uang di bank saja sudah beruntung sebab bunga ditawarkan oleh bank saat ini sangat besar*".

## **2. Menurunnya Keinginan Menjalankan Bisnis**

Inflasi mengakibatkan tidak ada kegembiraan di antara masyarakat bisnis. Mereka sudah mengalami trauma oleh inflasi yang melanda ekonomi negara. Mereka khawatir berspekulasi saat membuka bisnis, dan kerugian. Tentu tak satu pun dari pengusaha yang mendambakan untuk menjadi bisnis bangkrut.

## **3. Meningkatnya Pengangguran**

Inflasi menimbulkan sebagian besar baik perusahaan besar dan kecil ke dalam kebangkrutan. Sebagai akibatnya, tentu, pekerja atau pegawai terkena PHK. Mereka menjadi menganggur karena inflasi.

## **4. Gangguan Psikologis**

Tingkat inflasi menimbulkan gangguan psikologis. Seorang pebisnis mengalami kebangkrutan yang mendadak dapat depresi yang akut dan semuanya karena inflasi.

**5. Prospek UKM di Tengah Tingkat Inflasi** Dengan banyaknya perusahaan besar yang "lumpuh" karena inflasi, ternyata untuk sebuah usaha kecil maupun lebih dikenal dengan nama UKM (Usaha Kecil Menengah) pernah berjaya. UKM, tidak tergantung pada modal bank. Secara umum mereka gunakan permodalan dari uang pribadi. Saat inflasi muncul, mereka tidak memiliki kewajiban harus mengembalikan hutang yang sudah berubah jadi tinggi karena dari bunga tinggi. UKM, tidak lumpuh seperti Perusahaan Lainnya.

**Inflasi dan Perkembangan Negara** Tidak dapat dihindari inflasi sebagai penyebab stabilitas perekonomian sebuah negara yang diguncang, bahkan kehancuran. Tetapi, selalu ada peluang di balik kesempatan. Sesungguhnya, bila inflasi hampir seluruh perusahaan besar yang merasakan akibatnya, bahkan tak jarang banyak dari mereka mengalami

kebangkrutan. Namun, cobalah melihat, ada pula pengusaha kecil tetap bertahan di ditengah sebuah badai inflasi.

#### **Empat Jenis Inflasi Mayor**

**1. Inflasi Demand-Pull:** Tipe inflasi terjadi apabila jumlah permintaan untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian melampaui penyediaan sama saja. Saat suplai tersebut kurang, harga dari barang dan jasa akan naik, menyebabkan sebuah situasi disebut demand-pull inflasi. Tingkat inflasi jenis negatif berpengaruh terhadap perekonomian pasar

**2. Inflasi Cost-Push :** Sesuai dengan namanya, bila ada peningkatan biaya produksi barang atau jasa, ada mungkin ini akan menjadi kenaikan kuat dalam dengan harga dari barang dan jasa. Misalnya, peningkatan gaji akan naik per-unit cost dari produksi dan hal ini akan menyebabkan harga meningkat untuk Produk Terkait. Tingkat inflasi Tipe bisa atau tidak dapat terjadi bersama permintaan-tarik Tingkat inflasi.

**3. Inflasi Pricing Power :** Tingkat inflasi semakin sering dinamakan inflasi administered price. Tipe Tingkat inflasi muncul saat bisnis rumah dan industri memutuskan untuk meningkatkan harga barang dan jasa masing-masing untuk meningkatkan margin keuntungan mereka. Kenaikan harga tidak muncul pada waktu krisis ekonomi dan depresi yang ekonomi dan ketika ada kemerosotan dalam ekonomi.

**4. Inflasi Sektoral :** Ini adalah tipe keempat dari inflasi. Tingkat inflasi sektor muncul bila ada kenaikan harga dari barang dan jasa diproduksi oleh sektor industri khusus. Sebagai contoh, kenaikan biaya minyak bumi secara langsung akan mempengaruhi semua sektor lainnya, yang berkaitan langsung dengan industri minyak.

Bagaimana Inflasi terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, selama dua tahun ini seiring dan sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yaitu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bpk. Dr. Suryamin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2013 tercatat sebesar 6,23 persen. Konsumsi domestik dan investasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Badan Pusat

Statistik Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan sebesar 7,40 persen pada tahun 2013, namun tak sebesar dua tahun yang lalu yaitu tahun 2012 sebesar 7,99 persen namun dibandingkan tahun yang lalu yaitu tahun 2011 sebesar 7,93 ada sedikit penurunan yang bahkan di Kabupaten Berau sendiri mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding dua tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya aktivitas Pertambangan dan mengeliatnya sektor Perdagangan serta sektor- sektor lainnya. besaran atau nilai Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic Product) Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku tahun 2012 yaitu sebesar 11.187,56 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 12.814,78 milyar rupiah berarti ada kenaikan atau peningkatan di banding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.627,22 milyar rupiah, hal ini disebabkan oleh naiknya produksi barang dan jasa dan didorong oleh peningkatan harga global komoditas ekspor. Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic Product) atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2012 sebesar 5.364,33 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2013 sebesar 5.761,19 milyar rupiah yang berarti mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 396,86 milyar rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,409 persen. Pertumbuhan yang positif menunjukkan kenaikan produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Nilai Nominal PDRB merupakan besaran nilai tambah dari masing-masing sektor Ekonomi ( PDRB atas dasar harga berlaku ) dan digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber Daya Alam ( SDA ) dan Sumber daya Manusia ( SDM ). Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu dan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.

**Tabel 1.**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**DAN KONSTANT TAHUN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**TAHUN 2008 – 2013 ( Juta Rupiah )**

Tahun	PDRB Adhb	PDRB Adhk
(1)	(2)	(3)
2007	5.508.557,02	3.774.345,63
2008	6.191.023,87	4.019.641,74
2009	6.983.475,63	4.269.216,64

2010	8.079.288,50	4.602.168,79
2011	9.607.426,84	4.967.314,45
2012	11,187,561.80	5,364,331.92
2013	12,814,781.15	5,761,193.80

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan sama- sama mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Berau mengalami peningkatan baik dari nilai nominal maupun realitas produksi.

### Siklus Ekonomi Makro

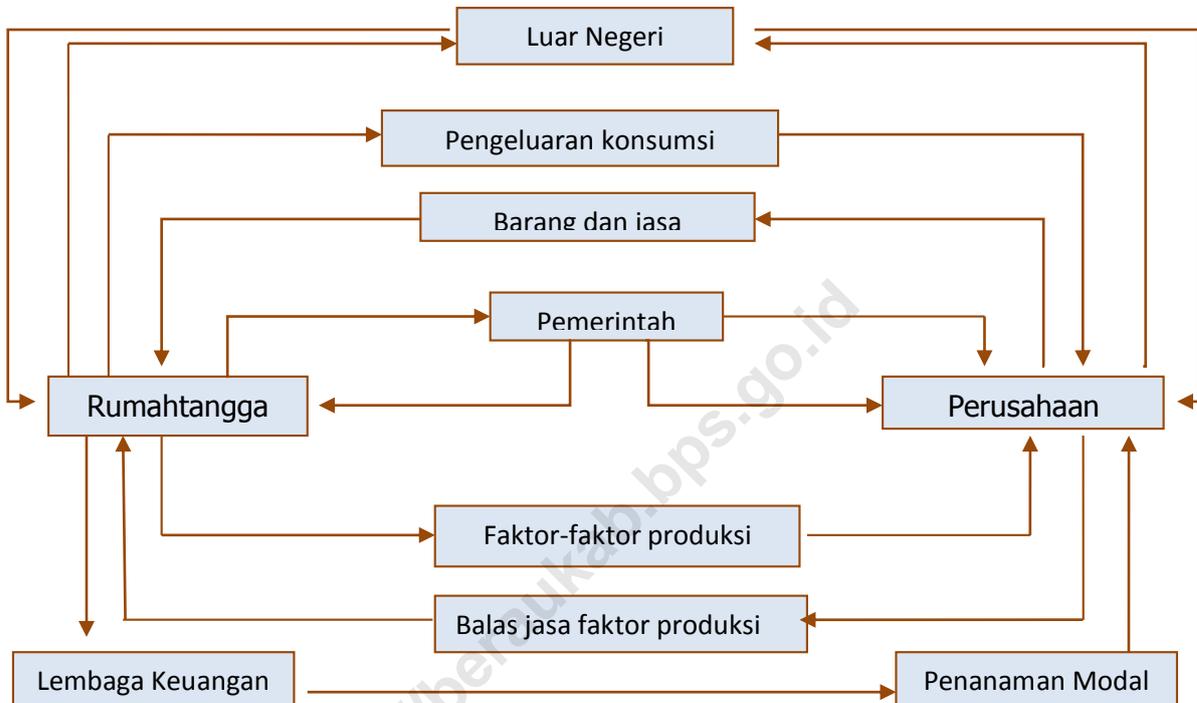
Gambar 1. Siklus perekonomian sederhana



Gambar di atas memberikan informasi bahwa :

- Ekonomi menggambarkan aliran barang dari produsen ke konsumen secara timbal balik
- Dalam perekonomian yang sederhana atau tertutup, biasanya siklus ekonomi mempunyai pola yang hanya melibatkan dua pelaku ekonomi yaitu rumah tangga dan perusahaan.

Gambar 2. Siklus perekonomian terbuka



Sedangkan gambar 2 menunjukkan bahwa :

- Akan terjadi Transaksi residen dan non residen ( Luar Negeri )
- Aktivitas ekonomi yang terjadi akan sangat kompleks

### 3.2. Struktur Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi daerah diukur dari peran masing-masing sektor / lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta disuatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Setruktur ekonomi suatu daerah menjadi faktor penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder atau tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor sekunder adalah sektor yang tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam, akan tetapi lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia yaitu sektor industri pengolahan, listrik dan air serta konstruksi. Sedangkan sektor tersier adalah sektor yang bisa dikatakan tidak mengandalkan sumber daya alam lagi yaitu sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain dan sektor jasa –jasa.

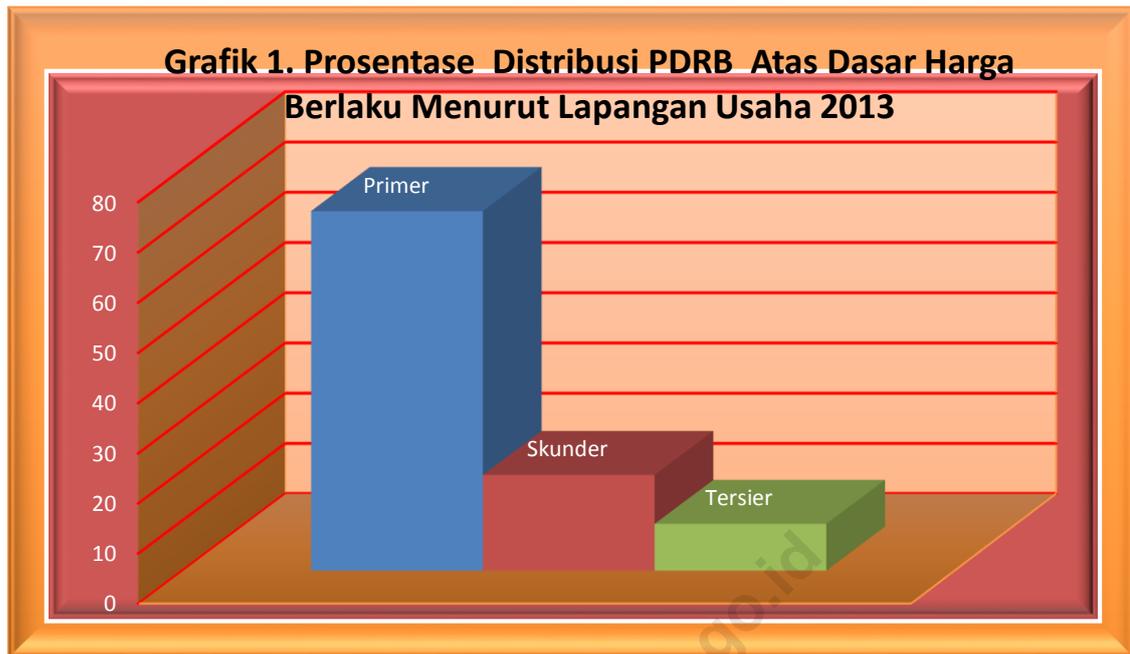
Struktur ekonomi Kabupaten Berau yang memberikan kontribusi yang terbesar adalah tiga sektor masing – masing, yang pertama Sektor Pertambangan dan penggalian yang mengandalkan sektor Sumber Daya Alam yaitu sebesar 7.412,45 milyar rupiah atau sebesar 57, 84 persen, yang kedua sektor Pertanian yaitu sebesar 1.766,50 milyar rupiah atau sebesar 13,78 persen dan yang ketiga yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1.521,33 milyar rupiah atau sebesar 11,87 persen. Nilai tambah atau prosentase untuk masing-masing sektor secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. PROSENTASE DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 – 2013 ( % ).**

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	14,43	13,79	12,89	11,64	14,47	13,78
2.	Pertambangan dan penggalian	51,99	53,10	55,70	68,49	57,22	57,84
3.	Industri Pengolahan	10,93	10,10	9,22	8,27	7,22	6,66
4.	Listrik dan Air	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,13
5.	Bangunan	0,97	1,03	1,02	1,09	1,04	1,01
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,61	11,23	11,03	10,96	10,88	11,78
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,71	6,42	6,02	5,65	5,52	5,43
8.	Bank dan Lembaga keuangan lainnya.	0,62	0,57	0,54	0,55	0,52	0,46
9.	Jasa-jasa	3,58	3,62	3,40	3,19	2,93	2,81

Sumber data : BPS Kabupaten Berau

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, dapat dikatakan bahwa setruktur ekonomi Kabupaten Berau masih didominasi oleh sektor primer dimana sektor yang bertumbuh pada Sumber Daya Alam ( SDA ) yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian Khususnya Batubara dengan kontribusi prosentase nilai tambah bruto terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 57,84 persen atau sebesar 7.412,24 milyar rupiah dan diikuti oleh sektor Pertanian sebesar 13,78 persen atau sebesar 1.766,50 milyar rupiah, apabila dijumlahkan kedua sektor tersebut sebesar 71,62 persen atau sebesar 9.178,74 milyar rupiah dari total PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2013 sebesar 12.814,78 milyar rupiah. Sehingga sektor Skunder dan tersier sebesar 19,07 persen atau sebesar 2,443,78 milyar rupiah yaitu sektor Perdagangan dan sektor lainnya. berarti ada kenaikan di sektor skunder yaitu sebesar 0,22 persen dibanding tahun 2012 yang kontribususnya sebesar 28,16 persen atau sebesar 2.150,53 milyar rupiah. Peningkatan sektor skunder yang terbesar adalah sub sektor perdagangan perhotelan, namun kenaikan dari sector skunder yang sangat kecil tidak meruba opini masyarakat Kabupaten Berau yang sering disebut sebagai daerah pertambangan, dikarenakan sektor ini menjadi sektor utama yang terbesar peranannya dalam perekonomian daerah. Urutan berikutnya adalah sektor tersier sebesar 9,31 persen atau sebesar 1,192,26 milyar rupaiah, nilai tambah bruto terhadap total PDRB Kabupaten Berau. Sehingga kalau kita perhatikan bahwasanya sektor primer mengalami peningkatan yang cukup besar dan sektor tersier dan sekunder cenderung mangalami mulai ada kenaikan terhadap pembentukan PDRB. Peran pemerintah untuk lebih perhatian terhadap sektor tersier yang dipimpin sektor perdagangan, hotel dan restoran karena sektor dibangun dari sektor – sektor yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Sektor skunder juga tak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sektor Primer dan sektor Tersier yang dipimpin sub sektor industri makanan dan subsektor industri yang lain yaitu sub sektor Industri Tekstil, subsektor Industri Kayu, sub sektor Industri Bahan kertas, Sub sektor Bahan Galian dan Sub sektor Industri Lainnya. dimana sektor ini dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor Primer dan sektor Tersier.



Disamping itu ada suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah itu lebih didominasi oleh sektor yang sudah terlepas dari keberadaan sumber daya alam (tertiary sector). Namun begitu akan lebih baik jika ada keterkaitan antar sector. Sebagaimana diketahui mayoritas perekonomian Kabupaten Berau ditopang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang termasuk sektro primer. Namun jika dapat terjalin simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara sektor primer dengan sektor lain, artinya masing-masing sektor tidak berdiri sendiri, bukan tidak mungkin akan tercipta suatu sistem perekonomian yang berbasis kuat. Dan yang terpenting adalah taraf hidup masyarakat khususnya tingkat bawah dapat terangkat.

### 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dinyatakan dalam nilai persentase, dihitung dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu dengan PDRB

---

atas dasar harga konstan tahun sebelumnya, mengurangkannya dengan satu, kemudian mengalikannya dengan seratus atau dihitung dengan mengurangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya, dibagi dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya, kemudian dikalikan seratus.

Formula Pertumbuhan

$$P = \frac{P_t - P_0}{P_0} \times 100 \text{ atau } P = \left( \frac{P_t}{P_0} - 1 \right) \times 100$$

Dimana :

P = Pertumbuhan ( % )

P<sub>t</sub> = PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu

P<sub>0</sub> = PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya.

Berdasarkan metode tersebut, penghitungan pertumbuhan ekonomi suatu daerah semata – mata menyandarkan pada besaran pada PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak selalu berarti terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi berorientasi pada pendekatan wilayah, sedangkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada pelaku kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan kehati – hatian dalam menginterpretasikan makna angka pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau sebesar 7,40 persen, **namun demikian pertumbuhan tak sebesar tahun 2012 yaitu sebesar 7,99 persen setelah mengalami revisi yang pada penerbitan tahun lalu sebesar 8,03 persen.** pertumbuhan didukung oleh sektor primer **yaitu** pertambangan dan penggalian sebesar 3.539,04 milyar rupiah atau 8,73 persen pertumbuhan tak sebesar tahun 2012 yaitu 10,12 persen namun jika dilihat nilai riilnya lebih besar pada tahun 2012. PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, sehingga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.254,85

milyar rupiah. Jika dilihat dari besaran Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga mengalami kenaikan atau peningkatan pada tahun 2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 12.814,78 milyar rupiah sedangkan tahun 2012 sebesar 11.187,56 milyar rupiah yang berarti mengalami peningkatan sebesar 14,55 persen. Sehingga perekonomian di Kabupaten Berau dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi dan didorong oleh kenaikan harga serta roda perekonomian berjalan dengan baik.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sektor pertambangan khususnya batu bara merupakan salah satu leading sector di daerah ini, sebagian besar masih untuk konsumsi pasar luar negeri. Dengan share 55,57 persen terhadap total PDRB membuat lokomotif perekonomian Kabupaten Berau didominasi oleh pertambangan yang diberi julukan “emas hitam” hal ini seyogyanya menjadi pemikiran dan perhatian pemerintah. Sudah sa’atnya daerah tidak terlalu menggantungkan kepada kekayaan alam. Memang dalam jangka waktu yang pendek keunggulan sumber daya alam di Kabupaten Berau (keunggulan komparatif) akan menguntungkan perekonomian daerah. Namun perlu diingat bahwa bahan –bahan mineral tersebut tidak bisa diperbarui. Disamping itu, kelestarian lingkungan juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sudah waktunya Ekonomi Hijau (Green Economic) harus menjadi perhatian khusus pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang sudah dicanangkan lama tahun yang lalu. Sehingga Kabupaten Berau menuju Produk Domestik Sektor Sekunder dan tersier diantaranya sector perdagangan. Sehingga mempunyai pendapatan per Kapita yang merata apabila sector ini benar-benar tercapai.

**Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstant(2000) Tahun 2008 -2013**



Pertumbuhan ekonomi selama enam tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dari table di atas terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan disetiap tahunnya yaitu tahun 2008 sampai dengan 2013. Secara sektoral pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian ditahun 2013 mencapai 8,73 persen lebih kecil dibanding tahun sebelumnya ( 2012 ) yaitu sebesar 10,12 persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh peningkatan aktivitas ekonomi sub sektor pertambangan batu bara. Sektor pertanian mangalami peningkatan dalam pertumbuhannya, pertumbuhan tersebut disumbang oleh sunsektor Peternakan sebesar 10,36 persen namun demikaian pertumbuhan tak sebesar ditahun 2012 atau sebelumnya yaitu sebesar 11,60 persen yang berarti ada penurunan pertumbuhan sebesar 1,24 persen dibanding tahun 2012, sub sector Perkebunan tumbuh sebesar 7,79 persen, subsector Perikanan meningkat sebesar 5,74

persen, sub sector Tanaman Bahan Makanan naik sebesar 2,00 persen sedangkan sub sector Kehutanan mengalami penurunan pertumbuhan 0,55 persen.

Industri pengolahan, sub sektor ini yang ada di Kabupaten Berau yaitu industri pengolahan tanpa migas terdiri dari Industri makanan, tekstil, kayu, bahan kertas, bahan galian dan industri lainnya. yang mengalami peningkatan di subsektor ini adalah Industri makanan, tekstil, bahan galian dan industri lainnya, sedangkan yang mengalami perlambatan yaitu industri kayu dan industri bahan kertas namun secara keseluruhan sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,24 persen dibanding tahun 2012 sebesar 1,00 persen ini dikarenakan terhentinya Industri Kertas yang dikelola oleh PT. Nusantara Kertas yang sangat mempengaruhi besaran nilai Sektor Industri Pengolahan sedangkan sub sector Industri pengolahan lainnya mengalami peningkatan .

Listrik mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 6,31 persen ditahun 2013 yang berarti mengalami pertumbuhan lebih besar dari tahun 2012 sebesar 5,99 persen. sehingga mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar 0,32 persen pertumbuhannya sedangkan PDAM mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 6,94 persen ditahun 2013 namun pertumbuhannya tak sebesar tahun 2012 yaitu sebesar 9,00 persen mengalami perlambatan sebesar 0,91 persen. Sektor bangunan mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 6,36 persen jika dibanding tahun 2011 ada peningkatan sebesar 1,76 persen yaitu sebesar 4,63 persen.

Sector Perdagangan, subsector ini semua mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2013 yaitu sebesar 11,63 persen. Dan masing pertumbuhan adalah 11,75 persen mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 3,13 persen dibanding tahun 2012 sebesar 8,62 subsector Perdagangan , kedua subsector Perhotelan yaitu sebesar 14,49

yang berarti mengalami kenaikan sebesar 2,49 persen disbanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 12,00 persen, subsektor Restoran sebesar 3,77 persen. Sector inilah yang seharusnya menjadi andalan pemerintah daerah karena sector ini tidak ada ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam dan sector ini disebut sector tersier. Jika sector ini dapat menopang perekonomian didaerah khususnya di Kabupaten Berau maka julukan kota emas hitam khususnya Batubara dapat diminimalisir kegiatan eksplorasi dalam melakukan produksinya.

Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sector yang mempunyai urutan ke tujuh dalam penyusunan ini, mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan terutama pengangkutan Udara pada tahun 2013 tumbuh sebesar 15,79 persen namun pertumbuhan tak sebesar ditahun 2012 yaitu sebesar 16,72 setelah diadakannya revisi dalam penghitungannya, diikuti dengan sector Angkutan Darat pada tahun 2013 tumbuh sebesar 2,52 persen naik sebesar 0,72 persen yang pada tahun 2012 sebesar 1,80 persen, namun demikian ada pengangkutan mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu Angkutan Laut sebesar 10,70 persen yang patahun 2012 tumbuh sebesar 11,93 persen, jika angkutan Sungai pada tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan namun ditahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,43 persen yang berarti mengalami kenaikan sebesar 1,58 persen disbanding tahun 2012 yang sebesar 3,85 persen. dan Komunikasi juga mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 8,18 persen pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 sebesar 10,00 namun jasa penunjang Komunikasi naik sangat signifikan yaitu sebesar 11,43 persen di tahun 2013 yang berarti ada kenaikan pertumbuhan sebesar 3,25 persen disbanding tahun 2012 yang sebesar 7,88 persen.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, setktor ini seluruh subsectornya mengalami peningkatan pertumbuhan yang masing adalah sector Bank tumbuh sebesar

8,90 pada tahun 2013 yang berarti ada kenaikan pertumbuhan sebesar 1,40 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar 7,50 persen, sector Lembaga keuangan bukan BANK tumbuh sebesar 1,73 persen, Sewa bangunan sebesar 1,15 dan sector Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 11,90 persen sector ini mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan yaitu 6,90 persen dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 5,00 persen.

Sektor Jasa –jasa jika dibandingkan tahun sebelumnya secara keseluruhan mengalami peningkatan pertumbuhan sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 5,49 dan pada tahun 2012 sebesar 4,28 persn. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sub sektor jasa Pemerintahan sebesar 5,60 persen pada subsektor jasa yang lain semua subsector mengalami kenaikan yaitu sub sector jasa Swasta, Jasa Sosial kemasyarakatan, Jasa Hiburan dan jasa perorangan berturut-turut sebesar 4,25 persen, 3,67 persen, 3,67 persen, 5,21 persen dan 4,60 persen pada tahun 2013. Namun demikian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau secara keseluruhan Tumbuh sebesar 7,40 pada tahun 2013 sedangkan ditahun 2012 sebesar 7,99 persen, hal ini seiring dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu sebesar 6,3 persen. Lihat tabel berikut :

**Tabel 3. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan Usaha Tahun 2008 – 2013.**

No.	Lapangan usaha	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	3.08	3.92	3.08	2.08	2.96	2,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	8.89	7.89	12.20	11.47	10.12	8,73
3.	Industri pengolahan	1.33	0.09	0.20	0.20	1.00	(0,24)
4.	Listrik dan Air Minum	4.95	5.27	4.23	3.86	6.27	6,31
5.	Bangunan	6.43	8.62	4.57	4.63	6.36	11,06
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.37	5.13	4.47	6.41	8.52	11,63
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.23	6.16	4.08	4.49	10.20	9,46

8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.98	1.85	9.14	1.69	2.25	1,88
9.	Jasa-Jasa	5.02	3.87	1.31	4.48	4.28	5,49
	<b>PDRB</b>	6.50	5.96	8.05	7.93	7.99	7,40

Sumber data : BPS Kabupaten Berau

Dari tabel 2 diatas terlihat jelas bahwa pertumbuhan pada sektor Pertambangan dan penggalian dan sektor Jasa – jasa juga mengalami peningkatan secara keseluruhan. Disektor pertambangan pertumbuhan didominasi oleh subsektor pertambangan batu bara sedangkan sektor Jasa – jasa pertumbuhan terbesar adalah jasa Pemerintahan.

### 3.4. PDRB perkapita dan Pendapatan Regional perkapita .

Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan membagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita adalah rata –rata nilai tambah perkapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun karena dalam nilai PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto dan faktor pendapatan neto ( net faktor income ), maka pemakaian angka PDRB perkapita sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan karena PDRB merupakan salah satu indikator tersebut.

**Tabel 4. PDRB perkapita Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000, Tahun 2008 – 2013**

Tahun	PDRB ADH berlaku			
	PDRB perkapita (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Pendapatan perkapita (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2008	36.546.129	10,24	26.840.658	8,32
2009	39.984.632	9,41	29.719.378	10,73

2010	45.115.443	12,83	33.955.171	14,25
2011	50.089.031	11,02	38.173.781	12,42
2012	56.106.820	12,01	43.061.971	12,81
2013	63.708.854	13,55	49,353,707	14,61

Sumber data : BPS Kabupaten Berau

Tabel 3. terlihat bahwa PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada setiap tahunnya selalu meningkat pada tahun 2008 hingga 2013 meningkat rata - rata sebesar 12,19 persen, sedangkan Pendapatan perkapita juga mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya yaitu sebesar 11,51 persen selama tahun 2008 hingga 2013. Sedangkan pendapatan perkapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam sebuah daerah pada suatu periode tertentu. Biasanya dihitung setiap periode satu tahun. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan daerah dihitung dari jumlah seluruh pendapatan daerah tersebut.

Oleh sebab itu jumlah penduduk praktis akan mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita di suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk disuatu daerah pada suatu periode tertentu ( biasanya satu tahun ).

#### PENGHITUNGAN

Cara menghitung pendapatan perkapita adalah PDRN atas dasar harga faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama. Sedangkan PDRN atas dasar harga faktor produksi diperoleh dari PDRB dikurang dengan PDRN atas dasar harga pasar, dan PDRN atas dasar harga pasar diperoleh dari PDRB dikurang dengan penyusutan dengan periode tahun yang sama. Secara matematis dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{PDRN adh faktor produksi}}{\sum \text{Penduduk}}$$

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{\sum PDRB}{\sum \text{Penduduk}}$$

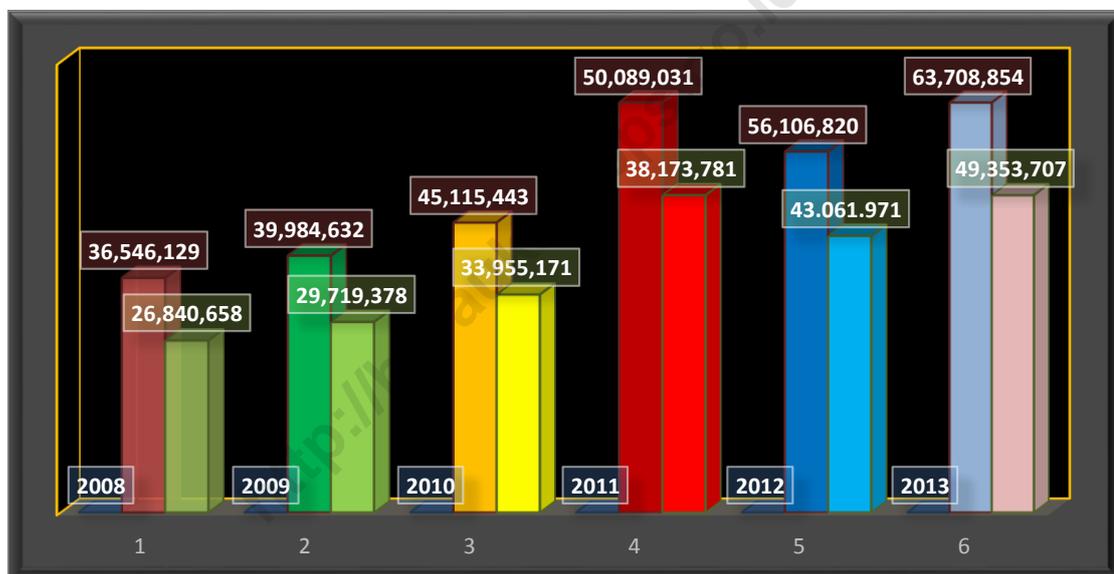
$$PDRN \text{ adh faktor produksi} = \frac{\sum PDRB}{PDRN \text{ adh pasar}}$$

$$PDRN \text{ adh pasar} = \sum PDRB - \text{penyusutan}$$

Dimana :

- Semua dilakukan dengan periode / tahun yang sama
- Baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 menggunakan formula yang sama.

**Grafik 3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2008 -2013**



Grafik 3. Menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada setiap tahunnya. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku juga naik yang sangat sangat signifikan. Pada tahun 2013 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 49.353.707 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp. 43.061.971 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp. 63.708. meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu TAHUN 2012 sebesar Rp. 56.106.820.

### 3.5. PDRB Perkapita antar Daerah

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan pembangunan di suatu daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Pendapatan perkapita merefleksikan PDRB perkapita. Untuk memacu peningkatan pendapatan disuatu daerah tentu keterbandingan antar daerah sangat penting sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan hal tersebut diatas. Keterbandingan tersebut terlihat dalam tabel 5 dibawah ini.

**Tabel 5. PDRB dan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dan Konstan 2000 menurut lapangan Usaha Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur tahun 2013.**

Kabupaten /Kota	PDRB (Jutaan rupiah)		PDRB Perkapita ( rupiah)
	Atas Dasar harga berlaku	Atas Dasar Harga Konstan	
Paser	16.680.291,69	6.285.640,18	57.348.678
Kutai Barat	8.083.976,00	3.508.012,06	41.366.124
Kutai Kartanegara	123.485.112,81	29.205.248,96	56.054.050
Kutai Timur	45.748.619,66	1.919.768,22	130.762.600
<b>Berau</b>	<b>12.814.781,15</b>	<b>5.761.193,80</b>	<b>63.708.854</b>
Malinau	2.558902,46	762.504,02	33.870.800
Bulungan	2.714.470,13	1.164.201,29	20.439.311
Nunukan	4.660.682,38	1.525.257,13	23.870.800
Panajam Paser Utara	3.845.143,70	2.216.079,98	13.681.335
Tana Tidung	379.560,21	195.651,40	22.770.563
Balikpapan	45.128.321,53	17.401.119,98	36.117.208
Samarinda	27.427.234,13	12.583.625,01	33.006.114
Tarakan	7.962.403,62	2.849.274,03	33.995.573
Bontang	61.925.526,03	20.997.684,54	57.481.177

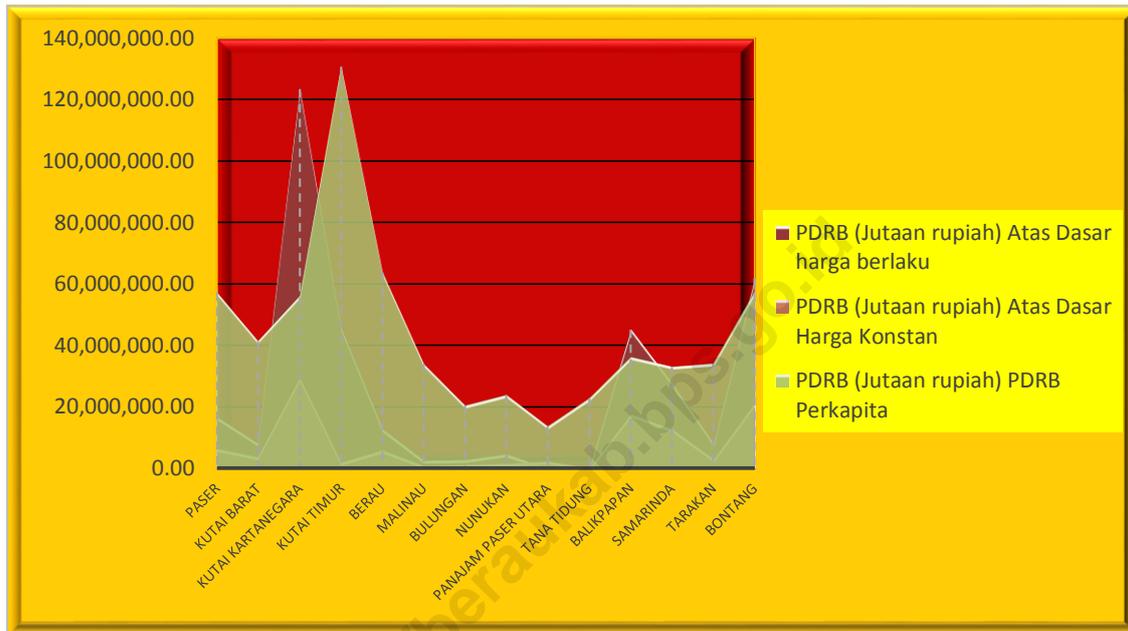
Sumber data : BPS Propinsi Kal –Tim

Ket. : PDRB Kabupaten / Kota dengan Migas.

Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Berau besaran PDRB Atas Dasar Hasga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 berada di urutan ke enam berarti naik satu tingkat di banding pada tahun 2012 yatu diurutan ke tujuh dari ke empat belas Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Timur dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar 12.814,78 milyar rupiah sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 yaitu sebesar 5.761,19 milyar rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga

berlaku tahun 2013 Kabupaten Berau sebesar Rp. 63.708.854 menempati urutan ke dua setelah Kabupaten Kutai Timur di seluruh Kabupaten / Kota di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

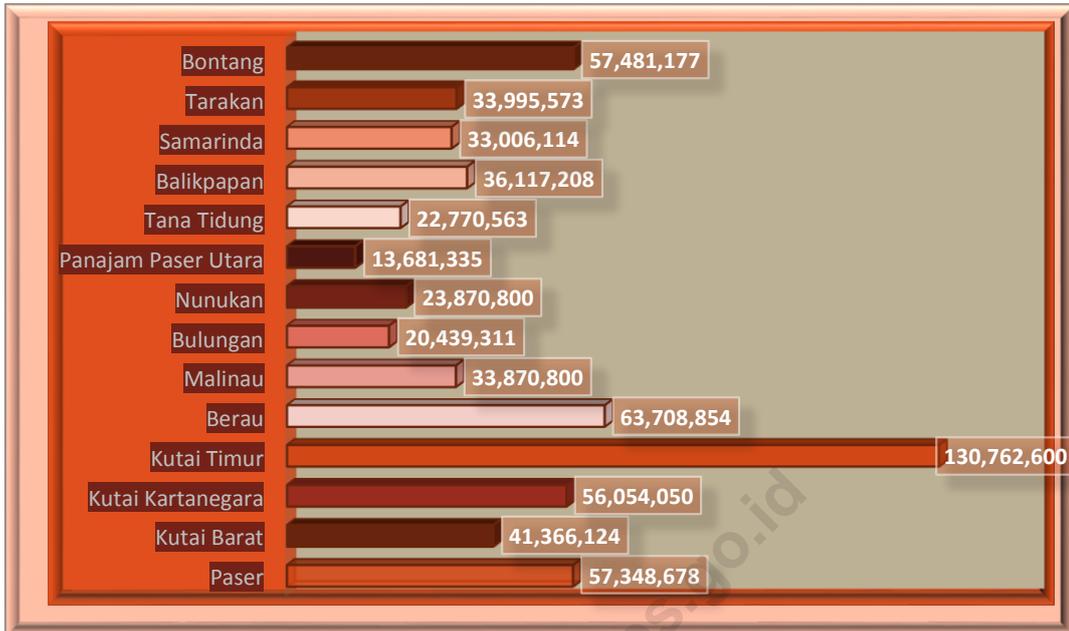
**Grafik 4. PDRB Atas DaSar Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2000 Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013**



Sumber data : BPS Kaltim (tanpa migas)

Grafik 4 adalah besaran PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 pada tahun 2013 kabupaten / Kota se Propinsi Kalimantan Timur. Dengan gambaran data , tabel dan grafik tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Berau dapat menentukan kebijakan apa yang harus diambil untuk kesejahteraan dan Kemakmuran masyarakatnya.

GRAFIK 5. BESARAN PDRB PERKAPITA TAHUN 2013 KABUPATEN / KOTA SEKALIMATAN TIMUR



Sumber data : BPS Kaltim ( dengan Migas )

Dari Tabel 5 terlihat bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Berau berada di urutan ke dua dengan nilai sebesar Rp. 63.708.854 PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan. Nilai PDRB atas dasar berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, pergeseran dan setruktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkebangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Salah satu indikator makro ekonomi , yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian, sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah PDRB per kapita dan pendapatan per kapita. PDRB perkapita merupakan ukuran rata-rata nilai tambah bruto yang diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas ekonomi selama periode waktu tertentu (dalam

penghitungan PDRB digunakan waktu satu tahun). PDRB perkapita dihitung dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama periode waktu tertentu (dalam penghitungan PDRB digunakan waktu satu tahun). Pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi total PDRN atas dasar biaya faktor produksi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita dapat dijadikan bahan rujukan pendekatan makro pendapatan penduduk di suatu daerah, hal ini disebabkan pajak tidak langsung neto telah dihilangkan dalam metode penghitungan. Akan tetapi pendapatan perkapita belum mampu memperhitungkan pendapatan riil (sebenarnya) sehingga masih bersifat semu, hal ini akibat belum diperhitungkannya pendapatan yang mengalir ke dalam, hasilnya merupakan produk regional neto atau disebut juga pendapatan daerah bersih. Untuk mendapatkan data tentang pendapatan yang mengalir ke luar/masuk (yang secara nasional diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri) masih sangat sukar diperoleh sehingga perlu pengkajian lebih dalam dengan melakukan survei dan penyusunan *net factor income* (pendapatan bersih). Namun untuk menggambarkan sementara maka dalam publikasi ini Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor masih dianggap sebagai pendapatan regional. Dan merupakan salah satu indikator dalam penyusunan anggaran dan salah satu indikator untuk mengambil kebijakan rencana pembangunan ekonomi disuatu daerah.

**Tabel 1**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**Tahun 2000-2013\*)**  
**(JUTA RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(15)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>893,199.52</b>	<b>963,044.46</b>	<b>1,041,495.89</b>	<b>1,092,237.15</b>	<b>1,619,053.69</b>	<b>1,766,502.80</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	158,091.68	177,499.52	200,311.85	220,002.24	243,088.58	277,628.73
b. Tanaman Perkebunan	96,301.72	105,101.22	120,514.81	144,733.28	168,153.00	199,185.80
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	14,018.96	15,480.37	18,104.06	21,221.17	26,639.86	33,194.09
d. Kehutanan	422,678.13	432,741.31	438,737.56	577,211.61	695,177.85	735,179.35
e. Perikanan	202,109.03	232,222.05	263,827.61	129,068.84	485,994.40	521,314.84
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>3,218,750.05</b>	<b>3,708,234.19</b>	<b>4,500,151.42</b>	<b>5,488,008.69</b>	<b>6,401,036.52</b>	<b>7,412,245.90</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
b. Pertambangan Tanpa Migas	3,210,362.57	3,698,455.47	4,488,928.49	<b>5,475,140.84</b>	6,385,073.48	7,391,322.67
c. Penggalian	8,387.48	9,778.72	11,222.93	12,867.85	15,963.04	20,923.23
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>676,855.93</b>	<b>705,099.01</b>	<b>745,056.22</b>	<b>776,196.62</b>	<b>813,842.33</b>	<b>853,232.16</b>
<b>a. Industri Migas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Industri Tanpa Migas</b>	<b>676,855.93</b>	<b>705,099.01</b>	<b>745,056.22</b>	<b>776,196.62</b>	<b>813,842.33</b>	<b>853,232.16</b>
b1. Industri Makanan	1,832.46	1,898.30	2,208.69	2,546.36	3,020.44	<b>3,323.35</b>
b2. Industri Tekstil	690.53	787.66	875.33	987.47	1,124.03	<b>1,233.49</b>
b3. Industri Kayu	6,288.76	6,494.46	6,852.30	7,409.51	8,435.82	<b>9,654.47</b>
b4. Industri Bahan Kertas	661,740.71	689,002.96	727,291.75	756,816.40	792,232.04	<b>829,134.06</b>
b5. Industri Bahan Galian	3,407.38	3,820.61	4,342.31	4,688.33	5,031.82	<b>5,622.45</b>
b6. Industri Lainnya	2,896.07	3,095.01	3,485.86	3,748.56	3,998.18	<b>4,264.33</b>
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>9,505.23</b>	<b>10,411.89</b>	<b>11,327.86</b>	<b>14,110.49</b>	<b>15,982.21</b>	<b>17,004.61</b>
a. Listrik	8,867.67	9,676.16	10,498.00	11,266.42	12,569.33	13,355.00
b. Air Minum	637.56	735.74	829.87	2,844.07	3,412.88	3,649.61
					-	0.00
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>60,120.17</b>	<b>71,707.07</b>	<b>82,398.81</b>	<b>102,679.00</b>	<b>116,471.55</b>	<b>129,355.70</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>656,903.85</b>	<b>783,764.49</b>	<b>891,512.64</b>	<b>1,028,757.96</b>	<b>1,217,588.72</b>	<b>1,521,333.92</b>
a. Perdagangan	629,728.00	752,398.52	856,290.91	982,471.53	1,162,477.43	1,453,327.06
b. Hotel	10,004.59	12,373.76	14,419.34	18,772.92	24,040.67	29,523.29
c. Restoran	17,171.26	18,992.21	20,802.39	27,513.51	31,070.62	38,483.58
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>415,549.50</b>	<b>448,436.05</b>	<b>486,735.69</b>	<b>530,086.61</b>	<b>618,013.40</b>	<b>696,007.91</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>381,184.30</b>	<b>404,248.75</b>	<b>434,682.30</b>	<b>468,711.83</b>	<b>547,383.35</b>	<b>618,346.02</b>
a1. Angkutan Darat	56,307.52	60,098.57	61,004.69	66,285.95	70,040.09	77,166.51
a2. Angkutan Laut	289,051.83	301,755.11	324,274.79	347,846.72	411,028.29	460,218.41
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	11,510.01	13,053.75	14,407.95	16,239.89	17,207.50	19,796.57
a4. Angkutan Udara	22,150.73	26,888.92	32,219.68	35,199.88	45,549.36	56,974.28
a5. Jasa Penunjang Angkutan	2,164.21	2,452.41	2,775.20	3,139.3860	3,558.1150	4,190.24
<b>b. Komunikasi</b>	<b>34,365.19</b>	<b>44,187.30</b>	<b>52,053.39</b>	<b>61,374.78</b>	<b>70,630.05</b>	<b>77,661.88</b>
b1. Komunikasi	29,793.52	37,768.43	45,025.56	53,341.91	61,231.49	67,160.85
b2. Jasa Penunjang Komunikasi	4,571.67	6,418.87	7,027.83	8,032.87	9,398.56	10,501.03
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>38,255.32</b>	<b>40,066.02</b>	<b>45,650.10</b>	<b>51,468.57</b>	<b>57,670.37</b>	<b>59,478.67</b>
a. Bank	2,786.81	3,165.61	3,590.84	4,406.16	5,145.17	5,658.86
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	4,501.03	4,944.10	6,234.42	7,034.67	7,795.48	8,006.44
c. Sewa Bangunan	30,334.37	31,245.86	35,022.76	39,661.18	43,727.15	44,689.55
d. Jasa Perusahaan	633.11	710.45	802.08	366.57	1,002.56	1,123.82
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>221,884.30</b>	<b>252,712.45</b>	<b>274,899.86</b>	<b>299,222.44</b>	<b>327,903.00</b>	<b>359,619.48</b>
<b>a. Pemerintahan Umum</b>	<b>206,361.56</b>	<b>236,361.56</b>	<b>257,361.56</b>	<b>279,361.56</b>	<b>304,948.79</b>	<b>334,926.80</b>
<b>b. Swasta</b>	<b>15,522.74</b>	<b>16,350.89</b>	<b>17,538.30</b>	<b>19,860.88</b>	<b>22,954.21</b>	<b>24,692.68</b>
b1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	4,782.40	5,494.13	5,874.00	6,309.37	7,219.86	7,907.16
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	632.25	703.97	771.86	956.47	1,108.28	1,179.23
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	10,108.08	10,152.80	10,892.44	12,595.05	14,626.07	15,606.29
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6,191,023.87</b>	<b>6,983,475.63</b>	<b>8,079,228.50</b>	<b>9,382,767.53</b>	<b>11,187,561.80</b>	<b>12,814,781.15</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @</b>	<b>6,191,023.87</b>	<b>6,983,475.63</b>	<b>8,079,228.50</b>	<b>9,382,767.53</b>	<b>11,187,561.80</b>	<b>12,814,781.15</b>

Ket. : \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Sangat Sementara  
 r) Angka Revisi  
 @ PDRB Tanpa Minyak dan Gas

Tabel 2

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000  
MENURUT LAPANGAN USAHA  
Tahun 2000-2013\*)  
(JUTA RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>663,385.47</b>	<b>689,401.65</b>	<b>710,624.94</b>	<b>725,380.08</b>	<b>746,825.60</b>	<b>765,165.80</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	90,869.99	96,622.15	102,100.50	108,020.10	110,748.77	112,963.84
b. Tanaman Perkebunan	68,830.83	71,768.15	78,123.25	81,602.59	84,868.43	93,659.78
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	11,633.22	12,603.85	13,845.02	15,009.84	16,750.42	18,054.93
d. Kehutanan	392,531.43	397,602.97	398,492.07	391,678.70	391,720.62	389,563.05
e. Perikanan	99,520.01	110,804.52	118,064.11	129,068.84	142,737.36	150,924.21
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>2,190,497.84</b>	<b>2,363,239.51</b>	<b>2,651,623.66</b>	<b>2,955,713.68</b>	<b>3,254,846.33</b>	<b>3,539,042.79</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Tanpa Migas	2,186,253.19	2,358,584.82	2,646,575.01	2,950,280.36	3,248,708.38	3,531,885.35
c. Penggalian	4,244.65	4,654.69	5,048.65	5,433.32	6,137.95	7,157.43
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>407,436.68</b>	<b>407,785.32</b>	<b>408,604.93</b>	<b>768,985.95</b>	<b>413,556.98</b>	<b>412,569.22</b>
<b>a. Industri Migas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Industri Tanpa Migas</b>	<b>407,436.68</b>	<b>407,785.32</b>	<b>408,604.93</b>	<b>768,985.95</b>	<b>413,556.98</b>	<b>412,569.22</b>
b1. Industri Makanan	992.64	1,003.78	1,091.93	1,161.55	1,252.33	1,359.48
b2. Industri Tekstil	419.24	477.49	529.67	568.23	604.34	660.11
b3. Industri Kayu	5,234.29	5,381.57	5,457.59	5,652.59	6,174.65	6,303.15
b4. Industri Bahan Kertas	396,936.14	396,797.09	396,936.14	756,816.40	400,521.67	399,081.49
b5. Industri Bahan Galian	2,095.50	2,312.89	2,621.66	2,749.53	2,914.13	3,024.20
b6. Industri Lainnya	1,758.86	1,812.51	1,967.94	2,037.66	2,089.87	2,140.79
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>3,561.54</b>	<b>3,749.25</b>	<b>3,907.98</b>	<b>4,058.93</b>	<b>4,313.58</b>	<b>4,585.76</b>
a. Listrik	3,261.53	3,422.03	3,556.55	3,678.09	3,898.47	4,141.86
b. Air Minum	300.01	327.22	351.43	380.84	415.11	443.91
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>32,260.51</b>	<b>35,039.85</b>	<b>36,639.89</b>	<b>38,337.73</b>	<b>40,775.42</b>	<b>45,286.02</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>394,072.45</b>	<b>414,270.17</b>	<b>432,800.80</b>	<b>460,524.51</b>	<b>499,781.89</b>	<b>557,919.03</b>
a. Perdagangan	379,049.89	398,928.21	416,827.27	443,692.67	481,933.28	538,580.40
b. Hotel	5,841.34	6,033.34	6,321.33	6,801.31	7,617.47	8,721.44
c. Restoran	9,181.22	9,308.62	9,652.20	10,030.53	10,231.14	10,617.19
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>215,939.68</b>	<b>229,235.16</b>	<b>238,584.65</b>	<b>249,292.80</b>	<b>274,731.36</b>	<b>300,727.01</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>195,907.73</b>	<b>205,104.92</b>	<b>212,202.17</b>	<b>220,336.35</b>	<b>242,970.72</b>	<b>266,218.05</b>
a1. Angkutan Darat	32,211.78	33,695.22	34,072.77	35,477.17	36,114.75	37,025.22
a2. Angkutan Laut	149,651.38	156,214.00	161,392.54	167,036.60	186,962.64	206,968.40
Sungai dan	4,638.52	4,896.22	5,177.70	5,605.27	5,820.88	6,137.07
a4. Angkutan Udara	8,196.83	8,997.86	10,135.67	10,701.44	12,491.03	14,463.27
a5. Jasa Penunjang Angkutan	1,209.22	1,301.61	1,423.49	1,515.87	1,581.41	1,624.09
<b>b. Komunikasi</b>	<b>20,031.95</b>	<b>24,130.24</b>	<b>26,382.48</b>	<b>28,956.46</b>	<b>31,760.64</b>	<b>34,508.97</b>
b1. Komunikasi	17,323.49	20,363.46	22,418.39	24,633.61	27,097.25	29,312.48
Penunjang	2,708.47	3,766.78	3,964.10	4,322.85	4,663.39	5,196.48
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>17,107.02</b>	<b>17,423.53</b>	<b>19,015.74</b>	<b>19,337.88</b>	<b>19,772.13</b>	<b>20,143.05</b>
a. Bank	806.55	875.11	963.45	1,017.78	1,094.12	1,191.53
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,753.77	1,833.66	2,117.77	2,144.19	2,246.33	2,285.17
c. Sewa Bangunan	14,231.68	14,382.56	15,585.13	15,809.34	16,046.79	16,235.64
d. Jasa Perusahaan	315.02	332.20	349.38	366.57	384.89	430.72
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>95,380.55</b>	<b>99,072.21</b>	<b>100,366.21</b>	<b>100,805.67</b>	<b>109,728.63</b>	<b>115,755.11</b>
a. Pemerintahan Umum	87,589.05	91,039.27	92,047.54	96,700.75	100,736.98	106,381.11
b. Swasta	7,791.50	8,032.93	8,318.67	4,104.91	8,991.65	9,374.00
b1. Jasa Sosial Masyarakat	2,982.18	3,196.36	3,279.74	3,375.64	3,603.92	3,736.24
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	327.86	347.77	355.64	364.64	379.78	399.56
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	4,481.47	4,488.80	4,683.29	364.64	5,007.95	5,238.20
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,019,641.74</b>	<b>4,259,216.64</b>	<b>4,602,168.79</b>	<b>5,322,437.23</b>	<b>5,364,331.92</b>	<b>5,761,193.80</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @</b>	<b>4,019,641.74</b>	<b>4,259,216.64</b>	<b>4,602,168.79</b>	<b>5,322,437.23</b>	<b>5,364,331.92</b>	<b>5,761,193.80</b>

Ket. : \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Sangat Sementara  
 r) Angka Revisi  
 @ PDRB Tanpa Minyak dan Gas

**Tabel 3**  
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA**

Tahun 2000-2013\*)

(%)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>3.08</b>	<b>3.92</b>	<b>3.08</b>	<b>2.08</b>	<b>2.96</b>	<b>2.46</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	12.85	6.33	5.67	5.80	2.53	2.00
b. Tanaman Perkebunan	3.06	4.27	8.86	4.45	4.00	10.36
c.	3.83	8.34	9.85	8.41	11.60	7.79
d. Kehutanan	-0.25	1.29	0.22	-1.71	0.01	-0.55
e. Perikanan	8.72	11.34	6.55	9.32	10.59	5.74
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>8.89</b>	<b>7.89</b>	<b>12.20</b>	<b>11.47</b>	<b>10.12</b>	<b>8.73</b>
a. Minyak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pertambang	8.90	7.88	12.21	11.48	10.12	8.72
c. Penggalian	1.63	9.66	8.46	7.62	12.97	16.61
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>1.33</b>	<b>0.09</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>1.00</b>	<b>-0.24</b>
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas	1.33	0.09	0.20	0.20	1.00	-0.24
b1. Industri Makanan	15.05	1.12	8.78	6.38	7.82	8.56
b2. Industri Tekstil	9.67	13.89	10.93	7.28	6.36	9.23
b3. Industri Kayu	2.32	2.81	1.41	3.57	9.24	2.08
b4. Industri Bahan Kertas	1.16	-0.04	0.04	0.08	0.82	-0.36
b5. Industri Bahan Galian	23.58	10.37	13.35	4.88	5.99	3.78
b6. Industri Lainnya	7.67	3.05	8.58	3.54	2.56	2.44
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>4.95</b>	<b>5.27</b>	<b>4.23</b>	<b>3.86</b>	<b>6.27</b>	<b>6.31</b>
a. Listrik	2.65	4.92	3.93	3.42	5.99	6.24
b. Air Minum	3.12	9.07	7.40	8.37	9.00	6.94
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>6.43</b>	<b>8.62</b>	<b>4.57</b>	<b>4.63</b>	<b>6.36</b>	<b>11.06</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>6.37</b>	<b>5.13</b>	<b>4.47</b>	<b>6.41</b>	<b>8.52</b>	<b>11.63</b>
a. Perdagangan	6.53	5.24	4.49	6.45	8.62	11.75
b. Hotel	3.40	3.29	4.77	7.59	12.00	14.49
c. Restoran	2.15	1.39	3.69	3.92	2.00	3.77
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>5.23</b>	<b>6.16</b>	<b>4.08</b>	<b>4.49</b>	<b>10.20</b>	<b>9.46</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>4.84</b>	<b>4.69</b>	<b>3.46</b>	<b>3.83</b>	<b>10.27</b>	<b>9.57</b>
a1. Angkutan Darat	2.75	4.61	1.12	4.12	1.80	2.52
a2. Angkutan Laut	5.31	4.39	3.32	3.50	11.93	10.70
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	-5.73	5.56	5.75	8.26	3.85	5.43
a4. Angkutan Udara	10.54	9.77	12.65	5.58	16.72	15.79
a5. Jasa	12.16	7.64	9.36	6.49	4.32	2.70
<b>b. Komunikasi</b>	<b>9.19</b>	<b>20.46</b>	<b>9.33</b>	<b>9.76</b>	<b>9.68</b>	8.65
b1. Komunikasi	2.63	17.55	10.09	9.88	10.00	8.18
b2. Jasa	84.84	39.07	5.24	9.05	7.88	11.43
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA</b>	<b>1.98</b>	<b>1.85</b>	<b>9.14</b>	<b>1.69</b>	<b>2.25</b>	<b>1.88</b>
a. Bank	2.99	8.50	10.10	5.64	7.50	8.90
b. Lembaga	8.96	4.56	15.49	1.25	4.76	1.73
c. Sewa Bangunan	1.08	1.06	8.36	1.44	1.50	1.18
d. Jasa Perusahaan	3.77	5.45	5.17	4.92	5.00	11.90
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>5.02</b>	<b>3.87</b>	<b>1.31</b>	<b>4.84</b>	<b>4.28</b>	<b>5.49</b>
Pemerintah	5.03	3.94	1.11	5.06	4.17	5.60
b. Swasta	4.97	3.10	3.56	2.49	5.46	4.25
b1. Jasa	8.30	7.18	2.61	2.92	6.76	3.67
Hiburan dan	5.97	6.08	2.26	2.53	4.15	5.21
b3. Jasa	2.79	0.16	4.33	2.19	4.64	4.60
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6.50</b>	<b>5.96</b>	<b>8.05</b>	<b>7.93</b>	<b>7.99</b>	<b>7.40</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @</b>	<b>6.50</b>	<b>5.96</b>	<b>8.05</b>	<b>7.93</b>	<b>7.99</b>	<b>7.40</b>

Ket\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

@ PDRB Tanpa Minyak dan Gas

**Tabel 4**  
**PERSENTASE DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**Tahun 2000-2013\*)**  
**(%)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
	(10)	(10)	(10)	(10)	(9)	(9)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>14.43</b>	<b>13.79</b>	<b>12.89</b>	<b>11.64</b>	<b>14.47</b>	<b>13.78</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	2.55	2.54	2.48	2.34	2.17	2.17
b. Tanaman Perkebunan	1.56	1.50	1.49	1.54	1.50	1.55
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.26
d. Kehutanan	6.83	6.20	5.43	6.15	6.21	5.74
e. Perikanan	3.26	3.33	3.27	1.38	4.34	5.74
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>51.99</b>	<b>53.10</b>	<b>55.70</b>	<b>58.49</b>	<b>57.22</b>	<b>57.84</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
b. Pertambangan Tanpa Migas	51.86	52.96	55.56	58.35	57.07	57.68
c. Penggalian	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>10.93</b>	<b>10.10</b>	<b>9.22</b>	<b>8.27</b>	<b>7.27</b>	<b>6.66</b>
a. Industri Migas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b. Industri Tanpa Migas	<b>10.93</b>	<b>10.10</b>	<b>9.22</b>	<b>8.27</b>	<b>7.27</b>	<b>6.66</b>
b1. Industri Makanan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<b>0.03</b>
b2. Industri Tekstil	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<b>0.01</b>
b3. Industri Kayu	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	<b>0.08</b>
b4. Industri Bahan Kertas	10.69	9.87	9.00	8.07	7.08	<b>6.47</b>
b5. Industri Bahan Galian	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	<b>0.04</b>
b6. Industri Lainnya	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	<b>0.03</b>
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.14</b>	<b>0.15</b>	<b>0.14</b>	<b>0.13</b>
a. Listrik	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10
b. Air Minum	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>0.97</b>	<b>1.03</b>	<b>1.02</b>	<b>1.09</b>	<b>1.04</b>	<b>1.01</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>10.61</b>	<b>11.22</b>	<b>11.03</b>	<b>10.96</b>	<b>10.88</b>	<b>11.87</b>
a. Perdagangan	10.17	10.77	10.60	10.47	10.39	11.34
b. Hotel	0.16	0.18	0.18	0.20	0.21	0.23
c. Restoran	0.28	0.27	0.26	0.29	0.28	0.30
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>6.71</b>	<b>6.42</b>	<b>6.02</b>	<b>5.65</b>	<b>5.52</b>	<b>5.43</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>6.16</b>	<b>5.79</b>	<b>5.38</b>	<b>5.00</b>	<b>4.89</b>	<b>4.83</b>
a1. Angkutan Darat	0.91	0.86	0.76	0.71	0.63	0.60
a2. Angkutan Laut	4.67	4.32	4.01	3.71	3.67	3.59
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	0.19	0.19	0.18	0.17	0.15	0.15
a4. Angkutan Udara	0.36	0.39	0.40	0.38	0.41	0.44
a5. Jasa Penunjang Angkutan	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
<b>b. Komunikasi</b>	<b>0.56</b>	<b>0.63</b>	<b>0.64</b>	<b>0.65</b>	<b>0.63</b>	0.61
b1. Komunikasi	0.48	0.54	0.56	0.57	0.55	0.52
b2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>0.62</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.55</b>	<b>0.52</b>	<b>0.46</b>
a. Bank	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06
c. Sewa Bangunan	0.49	0.45	0.43	0.42	0.39	0.35
d. Jasa Perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>3.58</b>	<b>3.62</b>	<b>3.40</b>	<b>3.19</b>	<b>2.93</b>	<b>2.81</b>
a. Pemerintahan Umum	<b>3.33</b>	<b>3.38</b>	<b>3.19</b>	<b>2.98</b>	<b>2.73</b>	2.61
b. Swasta	<b>0.25</b>	<b>0.23</b>	<b>0.22</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	0.19
b1. Jasa Sosial Masyarakat	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>REGIONAL BRUTO @</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	100.00

Ket \*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

**Tabel 5**  
**INDEKS PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**Tahun 2000-2013\*)**  
**(TAHUN 2000 = 100,00)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(9)	15
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>165.20</b>	<b>178.11</b>	<b>192.62</b>	<b>202.01</b>	<b>299.44</b>	<b>326.71</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	387.42	434.98	490.88	539.14	595.71	680.36
b. Tanaman Perkebunan	182.87	199.58	228.85	274.84	319.31	378.24
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	143.69	158.67	185.56	217.51	273.05	340.23
d. Kehutanan	114.11	116.82	118.44	155.82	187.67	198.47
e. Perikanan	301.47	346.38	393.53	192.52	724.91	777.60
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>288.93</b>	<b>332.87</b>	<b>403.95</b>	<b>492.63</b>	<b>574.59</b>	<b>665.36</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
b. Pertambangan Tanpa Migas	288.96	332.90	404.04	492.81	574.72	665.29
c. Penggalian	277.05	323.00	370.71	425.04	527.28	691.12
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>197.19</b>	<b>205.42</b>	<b>217.06</b>	<b>226.14</b>	<b>237.10</b>	<b>248.58</b>
a. Industri Migas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
b. Industri Tanpa Migas	<b>197.19</b>	<b>205.42</b>	<b>217.06</b>	<b>226.14</b>	<b>237.10</b>	<b>248.58</b>
b1. Industri Makanan	320.69	332.21	386.53	445.63	528.59	<b>581.61</b>
b2. Industri Tekstil	250.27	285.47	317.24	357.88	407.37	<b>447.05</b>
b3. Industri Kayu	144.02	148.73	156.93	169.69	193.19	<b>221.10</b>
b4. Industri Bahan Kertas	197.10	205.22	216.62	225.42	235.96	<b>246.96</b>
b5. Industri Bahan Galian	336.51	377.32	428.85	463.02	496.94	<b>555.28</b>
b6. Industri Lainnya	227.33	242.95	273.63	294.25	313.85	<b>334.74</b>
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>359.24</b>	<b>393.51</b>	<b>428.13</b>	<b>533.29</b>	<b>604.03</b>	<b>642.67</b>
a. Listrik	366.54	399.96	433.93	465.69	519.55	552.02
b. Air Minum	281.32	324.64	366.17	1,254.92	1,505.91	1,610.36
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>258.51</b>	<b>308.34</b>	<b>354.31</b>	<b>441.51</b>	<b>500.82</b>	<b>556.22</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>222.74</b>	<b>265.76</b>	<b>302.29</b>	<b>348.83</b>	<b>412.86</b>	<b>515.85</b>
a. Perdagangan	222.59	265.95	302.68	347.28	410.90	513.71
b. Hotel	225.47	278.86	324.97	423.08	541.80	665.36
c. Restoran	226.73	250.77	274.67	363.29	410.25	508.13
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>260.58</b>	<b>281.21</b>	<b>305.22</b>	<b>332.41</b>	<b>387.54</b>	<b>436.45</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>259.53</b>	<b>275.24</b>	<b>295.96</b>	<b>319.13</b>	<b>372.69</b>	<b>421.01</b>
a1. Angkutan Darat	240.71	256.92	260.79	283.37	299.42	329.88
a2. Angkutan Laut	255.22	266.44	286.32	307.13	362.92	406.35
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	281.86	319.66	352.82	397.68	421.38	484.78
a4. Angkutan Udara	416.26	505.29	605.47	661.47	855.96	1,070.66
a5. Jasa Penunjang Angkutan	264.32	299.52	338.94	383.42	434.56	511.76
<b>b. Komunikasi</b>	<b>272.81</b>	<b>350.78</b>	<b>413.22</b>	<b>487.22</b>	<b>560.69</b>	616.52
b1. Komunikasi	244.37	309.78	369.30	437.51	502.22	550.86
b2. Jasa Penunjang Komunikasi	1,129.31	1,585.62	1,736.05	1,984.32	2,321.68	2,594.01
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>290.78</b>	<b>304.54</b>	<b>346.98</b>	<b>391.21</b>	<b>438.35</b>	<b>452.10</b>
a. Bank	450.42	511.65	580.38	712.15	831.60	914.62
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	317.25	348.48	439.43	495.84	549.46	564.33
c. Sewa Bangunan	279.00	287.38	322.12	364.79	402.18	411.03
d. Jasa Perusahaan	257.06	288.46	325.67	148.84	407.07	456.30
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>421.71</b>	<b>480.30</b>	<b>522.46</b>	<b>568.69</b>	<b>623.20</b>	<b>683.48</b>
a. Pemerintahan Umum	<b>442.93</b>	<b>507.32</b>	<b>552.40</b>	<b>599.62</b>	<b>654.54</b>	718.88
b. Swasta	<b>257.59</b>	<b>271.34</b>	<b>291.04</b>	<b>329.58</b>	<b>380.92</b>	409.76
b1. Jasa Sosial Masyarakat	216.59	248.83	266.03	285.75	326.99	358.11
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	278.73	310.34	340.27	421.66	488.59	519.86
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	281.47	282.71	303.31	350.72	407.27	434.57
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>243.36</b>	<b>274.51</b>	<b>317.58</b>	<b>368.82</b>	<b>439.76</b>	<b>503.72</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @</b>	<b>283.32</b>	<b>319.59</b>	<b>369.73</b>	<b>429.39</b>	<b>511.98</b>	586.45

Ket. : \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Sangat Sementara  
 r) Angka Revisi  
 @ PDRB Tanpa Minyak dan Gas

Tabel 6

**INDEKS PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000  
MENURUT LAPANGAN USAHA  
(TAHUN 2000 = 100,00)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>122.69</b>	<b>127.50</b>	<b>131.43</b>	<b>134.16</b>	<b>138.12</b>	<b>141.52</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	222.69	236.78	250.21	264.71	271.40	276.83
b. Tanaman Perkebunan	130.70	136.28	148.35	154.96	161.16	177.85
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	119.24	129.19	141.91	153.85	171.69	185.06
d. Kehutanan	105.97	107.34	107.58	105.74	105.75	105.17
e. Perikanan	148.45	165.28	176.11	192.52	212.91	225.12
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>196.63</b>	<b>212.14</b>	<b>238.02</b>	<b>265.32</b>	<b>292.17</b>	<b>317.68</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Tanpa Migas	196.78	212.29	238.22	265.55	292.41	317.90
c. Penggalian	140.21	153.75	166.76	179.47	202.74	236.42
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>118.70</b>	<b>118.80</b>	<b>119.04</b>	<b>119.29</b>	<b>120.49</b>	<b>120.20</b>
a. Industri Migas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b. Industri Tanpa Migas	<b>118.70</b>	<b>118.80</b>	<b>119.04</b>	<b>119.29</b>	<b>120.49</b>	<b>120.20</b>
b1. Industri Makanan	173.72	175.67	191.09	203.28	219.16	237.92
b2. Industri Tekstil	151.94	173.05	191.97	205.94	219.03	239.24
b3. Industri Kayu	119.87	123.24	124.99	129.45	141.41	144.35
b4. Industri Bahan Kertas	118.23	118.18	118.23	118.33	119.29	118.87
b5. Industri Bahan Galian	206.95	228.42	258.92	271.54	287.80	298.67
b6. Industri Lainnya	138.07	142.28	154.48	159.95	164.05	168.05
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>134.61</b>	<b>141.70</b>	<b>147.70</b>	<b>153.40</b>	<b>163.03</b>	<b>173.32</b>
a. Listrik	134.81	141.45	147.01	152.03	161.14	171.20
b. Air Minum	132.38	144.38	155.06	168.04	183.16	195.87
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>138.72</b>	<b>150.67</b>	<b>157.55</b>	<b>164.85</b>	<b>175.33</b>	<b>194.73</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>133.62</b>	<b>140.47</b>	<b>146.75</b>	<b>156.15</b>	<b>169.46</b>	<b>189.18</b>
a. Perdagangan	133.98	141.01	147.34	156.83	170.35	190.37
b. Hotel	131.65	135.97	142.46	153.28	171.67	196.55
c. Restoran	121.23	122.91	127.45	132.44	135.09	140.19
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>135.41</b>	<b>143.75</b>	<b>149.61</b>	<b>156.33</b>	<b>172.28</b>	<b>188.58</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>133.39</b>	<b>139.65</b>	<b>144.48</b>	<b>150.02</b>	<b>165.43</b>	<b>181.26</b>
a1. Angkutan Darat	137.70	144.05	145.66	151.66	154.39	158.28
a2. Angkutan Laut	132.14	137.93	142.50	147.49	165.08	182.74
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	113.59	119.90	126.79	137.26	142.54	150.29
a4. Angkutan Udara	154.03	169.09	190.47	201.10	234.73	271.79
a5. Jasa Penunjang Angkutan	147.68	158.97	173.85	185.14	193.14	198.35
<b>b. Komunikasi</b>	<b>159.02</b>	<b>191.56</b>	<b>209.44</b>	<b>229.87</b>	<b>252.13</b>	<b>273.95</b>
b1. Komunikasi	142.09	167.02	183.88	202.05	222.25	240.42
b2. Jasa Penunjang Komunikasi	669.06	930.49	979.23	1,067.85	1,151.97	1,283.66
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>130.03</b>	<b>132.44</b>	<b>144.54</b>	<b>146.99</b>	<b>150.29</b>	<b>153.11</b>
a. Bank	130.36	141.44	155.72	164.50	176.84	192.58
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	123.61	129.24	149.27	151.13	158.33	161.07
c. Sewa Bangunan	130.90	132.28	143.34	145.41	147.59	149.33
d. Jasa Perusahaan	127.91	134.88	141.86	148.84	156.28	174.88
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>181.28</b>	<b>188.29</b>	<b>190.75</b>	<b>199.99</b>	<b>208.55</b>	<b>220.00</b>
a. Pemerintahan Umum	<b>188.00</b>	<b>195.41</b>	<b>197.57</b>	<b>207.56</b>	<b>216.22</b>	<b>228.34</b>
b. Swasta	<b>129.30</b>	<b>133.30</b>	<b>138.04</b>	<b>141.48</b>	<b>149.21</b>	<b>155.56</b>
b1. Jasa Sosial Masyarakat	135.06	144.76	148.54	152.88	163.22	169.21
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	144.54	153.32	156.78	160.75	167.43	176.15
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	124.79	124.99	130.41	133.26	139.45	145.86
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>158.00</b>	<b>167.42</b>	<b>180.90</b>	<b>195.25</b>	<b>210.86</b>	<b>226.46</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @</b>	<b>158.00</b>	<b>167.42</b>	<b>180.90</b>	<b>195.25</b>	<b>210.86</b>	<b>226.46</b>

Ket. : \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

r) Angka Revisi

@ PDRB Tanpa Minyak dan Gas

**Tabel 7**  
**INDEKS BERANTAI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA**  
 Tahun 2000-2013\*)  
 (TAHUN 2000 = 100,00)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>107.27</b>	<b>107.82</b>	<b>108.15</b>	<b>104.87</b>	<b>148.23</b>	<b>109.11</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	120.80	112.28	112.85	109.83	110.49	100.00
b. Tanaman Perkebunan	105.82	109.14	114.67	120.10	116.18	118.46
P	104.22	110.42	116.95	117.22	125.53	124.60
d. Kehutanan	101.62	102.38	101.39	131.56	120.44	105.75
e. Perikanan	111.42	114.90	113.61	48.92	376.54	107.27
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>115.27</b>	<b>115.21</b>	<b>121.36</b>	<b>121.95</b>	<b>116.64</b>	<b>115.80</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan Tanpa Migas	115.29	115.20	121.37	121.97	116.62	115.76
c. Penggalian	107.31	116.59	114.77	114.66	124.05	131.07
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>105.32</b>	<b>104.17</b>	<b>105.67</b>	<b>104.18</b>	<b>104.85</b>	<b>104.84</b>
a. Industri Migas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b. Industri Tanpa Migas	<b>130.74</b>	<b>104.17</b>	<b>105.67</b>	<b>104.18</b>	<b>104.85</b>	<b>104.84</b>
b1. Industri Makanan	124.24	103.59	116.35	115.29	118.62	110.03
b2. Industri Tekstil	115.48	114.07	111.13	112.81	113.83	109.74
b3. Industri Kayu	103.79	103.27	105.51	108.13	113.85	114.45
b4. Industri Bahan Kertas	105.12	104.12	105.56	104.06	104.68	104.66
b5. Industri Bahan Galian	131.80	112.13	113.65	107.97	107.33	111.74
b6. Industri Lainnya	117.95	106.87	112.63	107.54	106.66	106.66
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>109.56</b>	<b>109.54</b>	<b>108.80</b>	<b>124.56</b>	<b>106.40</b>	<b>106.40</b>
a. Listrik	109.39	109.12	108.49	107.32	111.56	106.25
b. Air Minum	112.10	115.40	112.79	342.71	120.00	106.94
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>114.48</b>	<b>119.27</b>	<b>114.91</b>	<b>124.61</b>	<b>113.43</b>	<b>111.06</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>116.78</b>	<b>119.31</b>	<b>113.75</b>	<b>115.39</b>	<b>118.36</b>	<b>124.95</b>
a. Perdagangan	117.01	119.48	113.81	114.74	118.32	125.02
b. Hotel	113.40	123.68	116.53	130.19	128.06	122.81
c. Restoran	110.70	110.60	109.53	132.26	112.93	123.86
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>133.96</b>	<b>107.91</b>	<b>108.54</b>	<b>108.91</b>	<b>116.59</b>	<b>112.62</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>108.81</b>	<b>106.05</b>	<b>107.53</b>	<b>107.83</b>	<b>116.78</b>	<b>112.96</b>
a1. Angkutan Darat	104.17	106.73	101.51	108.66	105.66	110.17
a2. Angkutan Laut	108.81	104.39	107.46	107.27	118.16	111.97
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	100.00	113.41	110.37	112.71	105.96	115.05
a4. Angkutan Udara	128.69	121.39	119.83	109.25	129.40	125.08
a5. Jasa Penunjang Angkutan	114.72	113.32	113.16	113.12	113.34	117.77
<b>b. Komunikasi</b>	<b>112.78</b>	<b>128.58</b>	<b>117.80</b>	<b>117.91</b>	<b>115.08</b>	109.96
b1. Komunikasi	105.96	126.77	119.21	118.47	114.79	109.68
b2. Jasa Penunjang Komunikasi	194.29	140.41	109.49	114.30	117.00	111.73
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>106.50</b>	<b>104.73</b>	<b>113.94</b>	<b>112.75</b>	<b>112.05</b>	103.14
a. Bank	113.37	113.59	113.43	122.71	116.77	109.98
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	116.52	109.84	126.10	112.84	110.82	102.71
c. Sewa Bangunan	104.49	103.00	112.09	113.24	110.25	102.20
d. Jasa Perusahaan	110.88	112.22	112.90	45.70	273.50	112.09
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>110.73</b>	<b>113.89</b>	<b>108.78</b>	<b>108.85</b>	<b>109.59</b>	109.67
a. Pemerintahan Umum	<b>110.73</b>	<b>114.54</b>	<b>108.88</b>	<b>108.55</b>	<b>109.16</b>	109.83
b. Swasta	<b>110.67</b>	<b>105.34</b>	<b>107.26</b>	<b>113.24</b>	<b>115.57</b>	107.57
b1. Jasa Sosial Masyarakat	118.73	114.88	106.91	107.41	114.43	109.52
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	109.73	111.34	109.64	123.92	115.87	106.40
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	107.28	100.44	107.29	115.63	116.13	106.70
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>112.39</b>	<b>112.80</b>	<b>115.69</b>	<b>116.13</b>	<b>119.24</b>	<b>114.54</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @</b>	<b>112.39</b>	<b>112.80</b>	<b>115.69</b>	<b>116.13</b>	<b>119.24</b>	<b>114.54</b>

Ket. : \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Sangat Sementara  
 r) Angka Revisi  
 @ PDRB Tanpa Minyak dan Gas

**Tabel 8**  
**INDEKS BERANTAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**Tahun 2000-2013\*)**  
**(TAHUN 2000 = 100,00)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(9)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>103.08</b>	<b>103.92</b>	<b>103.08</b>	<b>102.08</b>	<b>102.96</b>	<b>102.46</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	112.85	106.33	105.67	105.80	102.53	102.00
b. Tanaman Perkebunan	103.06	104.27	108.86	104.45	104.00	110.36
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	103.83	108.34	109.85	108.41	111.60	107.79
d. Kehutanan	99.75	101.29	100.22	98.29	100.01	99.45
e. Perikanan	108.72	111.34	106.55	109.32	110.59	105.74
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>108.89</b>	<b>107.89</b>	<b>112.20</b>	<b>111.47</b>	<b>110.12</b>	<b>108.73</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
b. Pertambangan Tanpa Migas	108.90	107.88	112.21	111.48	110.12	108.72
c. Penggalian	101.63	109.66	108.46	107.62	112.97	116.61
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>101.33</b>	<b>100.09</b>	<b>100.20</b>	<b>100.20</b>	<b>101.00</b>	<b>99.76</b>
a. Industri Migas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
b. Industri Tanpa Migas	<b>101.33</b>	<b>100.09</b>	<b>100.20</b>	<b>100.20</b>	<b>101.00</b>	<b>99.76</b>
b1. Industri Makanan	115.05	101.12	108.78	106.38	107.82	108.56
b2. Industri Tekstil	112.00	113.89	110.93	107.28	106.36	109.23
b3. Industri Kayu	102.32	102.81	101.41	103.57	109.24	102.08
b4. Industri Bahan Kertas	101.16	99.96	100.04	100.08	100.82	99.64
b5. Industri Bahan Galian	123.58	110.37	113.35	104.88	105.99	103.78
b6. Industri Lainnya	107.67	103.05	108.58	103.54	102.56	102.44
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>104.95</b>	<b>105.27</b>	<b>104.23</b>	<b>103.86</b>	<b>106.27</b>	<b>106.31</b>
a. Listrik	104.74	104.92	103.93	103.42	105.99	106.24
b. Air Minum	107.36	109.07	107.40	108.37	109.00	106.94
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>106.43</b>	<b>108.62</b>	<b>104.57</b>	<b>104.63</b>	<b>106.36</b>	<b>111.06</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>106.37</b>	<b>105.13</b>	<b>104.47</b>	<b>106.41</b>	<b>108.52</b>	<b>111.63</b>
a. Perdagangan	106.53	118.86	104.49	106.45	108.62	111.75
b. Hotel	103.40	103.29	104.77	107.59	112.00	114.49
c. Restoran	102.15	101.39	103.69	103.92	102.00	103.77
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>105.23</b>	<b>106.16</b>	<b>104.08</b>	<b>104.49</b>	<b>110.20</b>	<b>109.46</b>
<b>a. Angkutan</b>	<b>104.84</b>	<b>104.69</b>	<b>103.46</b>	<b>103.83</b>	<b>110.27</b>	<b>109.57</b>
a1. Angkutan Darat	102.75	104.61	101.12	104.12	101.80	102.52
a2. Angkutan Laut	105.31	104.39	103.32	103.50	111.93	110.70
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	94.27	105.56	105.75	108.26	103.85	105.43
a4. Angkutan Udara	110.54	109.77	112.65	105.58	116.72	115.79
a5. Jasa Penunjang Angkutan	112.16	107.64	109.36	106.49	104.32	102.70
<b>b. Komunikasi</b>	<b>109.19</b>	<b>120.46</b>	<b>109.33</b>	<b>109.76</b>	<b>109.68</b>	<b>108.65</b>
b1. Komunikasi	102.63	117.55	110.09	109.88	110.00	108.18
b2. Jasa Penunjang Komunikasi	184.84	139.07	105.24	109.05	107.88	111.43
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>101.98</b>	<b>101.85</b>	<b>109.14</b>	<b>101.69</b>	<b>102.25</b>	<b>101.88</b>
a. Bank	102.99	108.50	110.10	105.64	107.50	108.90
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	108.96	104.56	115.49	101.25	104.76	101.73
c. Sewa Bangunan	101.08	101.06	108.36	101.44	101.50	101.18
d. Jasa Perusahaan	103.77	105.45	105.17	104.92	105.00	111.90
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>105.02</b>	<b>103.87</b>	<b>101.31</b>	<b>104.84</b>	<b>104.28</b>	<b>105.49</b>
a. Pemerintahan Umum	<b>105.03</b>	<b>103.94</b>	<b>101.11</b>	<b>105.06</b>	<b>104.17</b>	<b>105.60</b>
b. Swasta	<b>104.97</b>	<b>103.10</b>	<b>103.56</b>	<b>102.49</b>	<b>105.46</b>	<b>104.25</b>
b1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	108.30	107.18	102.61	102.92	106.76	103.67
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	105.97	106.08	102.26	102.53	104.15	105.21
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	102.79	100.16	104.33	102.19	104.64	104.60

**Tabel 9**  
**INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**Tahun 2000-2013\*)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(9)	(8)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>134.64</b>	<b>139.69</b>	<b>146.56</b>	<b>150.57</b>	<b>216.79</b>	<b>230.87</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	173.98	183.70	196.19	203.67	219.50	245.77
b. Tanaman Perkebunan	139.91	146.45	154.26	177.36	198.13	212.67
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	120.51	122.82	130.76	141.38	159.04	183.85
d. Kehutanan	107.68	108.84	110.10	147.37	177.47	188.72
e. Perikanan	203.08	209.58	223.46	100.00	340.48	345.41
<b>2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>	<b>146.94</b>	<b>156.91</b>	<b>169.71</b>	<b>185.67</b>	<b>196.66</b>	<b>209.44</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
b. Pertambangan Tanpa Migas	146.84	156.81	169.61	185.58	196.54	209.27
c. Penggalian	197.60	210.08	222.30	236.83	260.07	292.33
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>166.13</b>	<b>172.91</b>	<b>182.34</b>	<b>189.57</b>	<b>196.79</b>	<b>206.81</b>
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas	<b>166.13</b>	<b>172.91</b>	<b>182.34</b>	<b>189.57</b>	<b>196.79</b>	<b>206.81</b>
b1. Industri Makanan	184.60	189.11	202.27	219.22	241.19	244.46
b2. Industri Tekstil	164.71	164.96	165.26	173.78	185.99	186.86
b3. Industri Kayu	120.15	120.68	125.56	131.08	136.62	153.17
b4. Industri Bahan Kertas	166.71	173.64	183.23	190.50	197.80	207.76
b5. Industri Bahan Galian	162.60	165.19	165.63	170.51	172.67	185.92
b6. Industri Lainnya	164.66	170.76	177.13	183.96	191.31	199.19
<b>4. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM</b>	<b>266.89</b>	<b>277.71</b>	<b>289.86</b>	<b>347.64</b>	<b>370.51</b>	<b>370.81</b>
a. Listrik	271.89	282.76	295.17	306.31	322.42	322.44
b. Air Minum	212.51	224.84	236.14	746.80	822.16	822.16
<b>5. BANGUNAN</b>	<b>186.36</b>	<b>204.64</b>	<b>224.89</b>	<b>267.83</b>	<b>285.64</b>	<b>285.64</b>
<b>6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	<b>166.70</b>	<b>189.19</b>	<b>205.99</b>	<b>223.39</b>	<b>243.62</b>	<b>272.68</b>
a. Perdagangan	166.13	188.60	205.43	221.43	241.21	269.84
b. Hotel	171.27	205.09	228.11	276.02	315.60	338.51
c. Restoran	187.03	204.03	215.52	274.30	303.69	362.46
<b>7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	<b>192.44</b>	<b>195.62</b>	<b>204.01</b>	<b>212.64</b>	<b>224.95</b>	<b>231.44</b>
<b>a. Angkutan</b>	194.57	197.09	204.84	212.73	225.29	232.27
a1. Angkutan Darat	174.80	178.36	179.04	186.84	193.94	208.42
a2. Angkutan Laut	193.15	193.17	200.92	208.25	219.85	222.36
a3. Angkutan Sungai dan Penyeberangan	248.14	266.61	278.27	289.73	295.62	322.57
a4. Angkutan Udara	270.24	298.84	317.88	328.93	364.66	393.92
a5. Jasa Penunjang Angkutan	178.98	188.41	194.96	207.10	225.00	258.00
<b>b. Komunikasi</b>	<b>171.55</b>	<b>183.12</b>	<b>197.30</b>	<b>211.96</b>	<b>222.38</b>	<b>225.05</b>
b1. Komunikasi	171.98	185.47	200.84	216.54	225.97	229.12
b2. Jasa Penunjang Komunikasi	168.79	170.41	177.29	185.82	201.54	202.08
<b>8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	<b>223.62</b>	<b>229.95</b>	<b>240.06</b>	<b>266.15</b>	<b>291.68</b>	<b>295.28</b>
a. Bank	345.52	361.74	372.71	432.92	470.26	474.93
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	256.65	269.63	294.39	328.08	347.03	350.37
c. Sewa Bangunan	213.15	217.25	224.72	250.87	272.50	275.26
d. Jasa Perusahaan	200.98	213.86	229.57	100.00	260.48	260.92
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>232.63</b>	<b>255.08</b>	<b>273.90</b>	<b>284.36</b>	<b>298.83</b>	<b>310.67</b>
a. Pemerintahan Umum	<b>235.60</b>	<b>259.63</b>	<b>279.60</b>	<b>288.89</b>	<b>302.72</b>	<b>314.84</b>
b. Swasta	<b>199.23</b>	<b>203.55</b>	<b>210.83</b>	<b>232.95</b>	<b>255.28</b>	<b>263.42</b>
b1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	160.37	171.89	179.10	186.91	200.33	211.63
b2. Jasa Hiburan dan Rekreasi	192.84	202.42	217.04	262.31	291.82	295.13
b3. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	225.55	226.18	232.58	263.18	292.06	297.93
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>154.02</b>	<b>163.96</b>	<b>175.55</b>	<b>188.89</b>	<b>208.55</b>	<b>222.43</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @</b>	<b>154.02</b>	<b>163.96</b>	<b>175.55</b>	<b>188.89</b>	<b>208.55</b>	<b>222.43</b>

Ket. : \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Sangat Sementara  
 r) Angka Revisi  
 @ PDRB Tanpa Minyak dan Gas

Tabel 11

**AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL DAN PENDAPATAN PERKAPITA MENURUT LAPANGAN USAHA  
Tahun 2000-2013\*)**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010r)	2011	2012*)	2013**)
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(12)
<b>I. Atas Dasar Harga Berlaku</b>						
a. Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	6,191,023.87	6,983,475.63	8,079,228.50	9,382,767.53	11,187,561.80	12,814,781.15
b. Penyusutan (Juta Rupiah)	482,019.62	482,019.62	482,019.62	482,019.62	482,019.62	482,019.62
c. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)	5,709,004.25	6,501,456.02	7,597,208.88	8,900,747.92	10,705,542.18	12,332,761.53
d. Pajak Tidak Langsung	1,162,116.25	1,310,867.27	1,516,550.89	1,761,238.03	2,100,015.71	2,405,460.84
e. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor Produksi (Juta Rupiah)	4,546,888.00	5,190,588.75	6,080,657.99	7,139,509.89	8,605,526.47	9,927,300.69
f. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	169,403	174,661	179,079	191,807	193,831	201,146
g. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rupiah)	36,546,129	39,983,028	45,115,443	48,917,753	57,718,125	63,708,854
h. Pendapatan Regional per Kapita (Rupiah)	26,840,658	29,718,075	33,955,171	37,222,364	44,397,060	49,353,707
<b>II. Atas Dasar Harga Konstan 2000</b>						
a. Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	3,534,270.84	3,774,345.63	4,019,641.74	4,259,216.64	4,602,168.79	4,967,314.45
b. Penyusutan (Juta Rupiah)	298,896.16	298,896.16	298,896.16	298,896.16	298,896.16	298,896.16
c. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rupiah)	3,235,374.68	3,475,449.47	3,720,745.59	3,960,320.48	4,303,272.63	4,668,418.29
d. Pajak Tidak Langsung	200,068.35	213,658.53	227,544.28	241,106.16	260,520.03	281,190.23
e. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Faktor	3,035,306.33	3,261,790.94	3,493,201.31	3,719,214.33	4,042,752.61	4,387,228.07
f. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	169,403	174,661	179,079	191,807	193,831	201,146
g. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rupiah)	20,863,095	21,609,550	22,446,193	22,205,741	23,743,203	24,695,069
h. Pendapatan Regional	17,917,666	18,674,981	19,506,482	19,390,399	20,857,100	21,811,162

**P**roduk Domestik adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi disuatu wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari/atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik.

**P**roduk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayar ke luar daerah/negeri.

## Data

# Mencerdaskan Bangsa



**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Berau**

**P**roduk Domestik adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi disuatu wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari/atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik.

**P**roduk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayar ke luar daerah/negeri.

## Data

# Mencerdaskan Bangsa



**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Berau**